

**SEJARAH KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI GURU
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 1980-2000**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam



Oleh:

Agus Tri Laksono

NIM U20184026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2023**

SEJARAH KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI GURU DI KABUPATEN
KEDIRI TAHUN 1980-2000

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Oleh:
Agus Tri Laksono
NIM U20184026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Win Usuluddin, M. Hum
NIP 19700118 200801 1 012


**SEJARAH KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI GURU DI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 1980-2000**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Tinjau Persepsi
Hari: Selasa
Tanggal: 10 Januari 2023

Ketua


Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 19800716 201101 1004 001

Sekretaris


Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.
NIP. 19900528 201801 1001

Anggota:

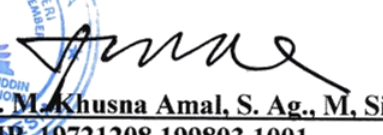
1. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
2. Dr. Win Usuluddin, M.Hum.


Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

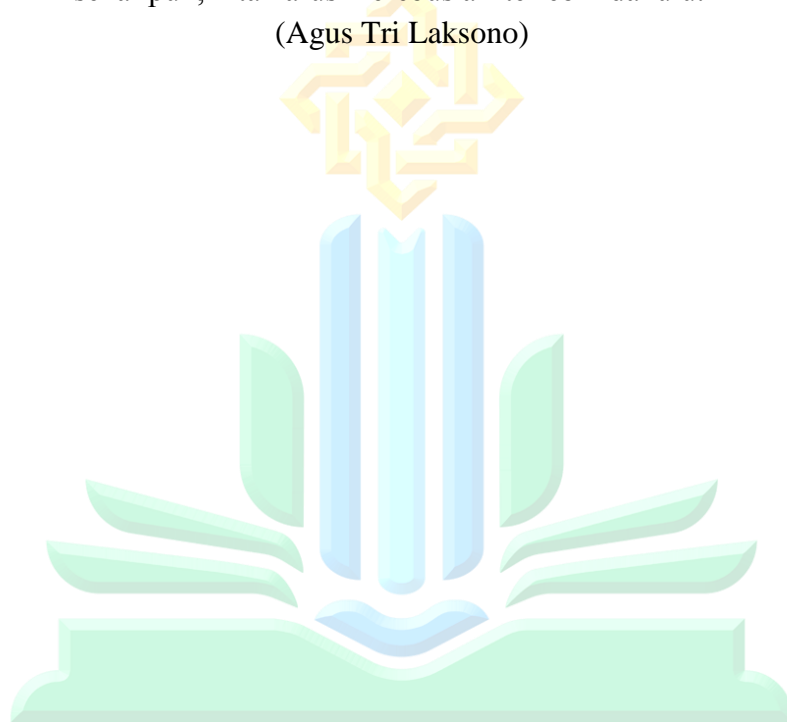



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP. 19721208 199803 1001

MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.”¹(QS. Ar-Rahmaan:
13)

“Tidak ada kesuksesan instan dalam hidup ini, bahkan untuk membuat mie instan
sekalipun, kita harus merebus air terlebih dahulu.”¹
(Agus Tri Laksono)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Q.S. Ar-Rahmaan (27): 13.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya (Alm. Bapak Poniman Hadi dan Ibu Srianti) yang selalu memberikan semangat serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini, juga seluruh keluarga penulis yang tidak henti memberikan motivasi.
2. Kepada kakak saya tercinta Sony Eko Aprilliawan S.Trp dan Hri Dwi Permana yang selalu mensupport saya selama menjalani perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Kepada keluarga saya yang berada di Rambipuji dan saudara-saudara saya yang ada di jember
4. Untuk *my lovely* Rahmatut Toyyibah yang saat ini sedang menempuh perjalanan skripsi juga, yang memberikan semangat dan motivasinya
5. Untuk teman-teman asrama Al-Musawa: Mas Azzam, Mas Fajar Shodiq, Mas Saipan Shodiq, Zidni Abdul Jabar dkk. yang senantiasa membantu dan mensupport selama proses mengerjakan skripsi
6. Untuk teman-teman SPI Se-perjuangan saya yang selalu membangkitkan semangat untuk menempuh pendidikan di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember Tercinta
7. Untuk Almamater Tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya lah, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Terselesainya penulisan skripsi ini, penulis sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing Dr. Win Ushuluddin M.Hum yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.

4. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Dr. Akhyat, S.Ag., M.Pd atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap keluarga Bapak Tri Soekarno dan Keluarga Bapak Soeharto yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam penyelesaian terhadap penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya

Jember, 1 Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Agus Tri Laksono. 2022. *Sejarah Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru di Kabupaten Kediri tahun 1980-2000*

Permasalahan dalam kehidupan guru pada tahun 1980-2000 di kabupaten Kediri. Yang mana pada masa tersebut guru dalam kehidupannya dapat dikatakan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kesejahteraan guru menjadi polemik yang terjadi dikalangan para guru dalam memperjuangkan hak-hak nya. Fokus penelitian ini ada dua yaitu: (1) Bagaimana sejarah kehidupan guru pada tahun 1980-2000? (2) Bagaimana analisis kehidupan sosial-ekonomi guru di kabupaten Kediri pada tahun 1980-2000? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah kehidupan guru pada tahun 1980-2000 di kabupaten Kediri. Berdasarkan masalah tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan, yaitu: penelitian deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini meliputi: beberapa orang guru yang telah pensiun dengan masa aktif pada tahun 1980-2000. Untuk menguji keabsahan data, triangulasi data dan analisis data, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arnold J. Toynbee, yakni teori *Challenge & Respons*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan guru pada tahun 1980-2000 di kabupaten Kediri dapat dikatakan jauh dari sejahtera. Banyak guru yang juga mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu pada masa pemerintahan yang berkuasa pada masa tersebut, bahwa gurunya hanya dijadikan alat politik oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan guru pada tahun tersebut kurang sejahtera, dan hanya sebagai alat politik penguasa.

Kata kunci: *Guru, Sejahtera, Kabupaten Kediri*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	10
F. Studi Terdahulu	13
G. Lokasi Penelitian	14
H. Subjek Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II SETING DAN LATAR BELAKANG	25
A. Periode Awal Oil Boom Indonesia	25
B. Oil Boom 1973-1975	30

BAB III POTRET GURU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN

1980-2000	36
A. Pendidikan Guru Dan Ekonomi Guru	36
B. Tunjangan Guru	40
C. Birokrasi	41
D. PGRI Kabupaten Kediri: Bentuk Korporatisme Orde Baru	
E. 1982-1997	44
F. Awal Reformasi	45
G. Era Reformasi.....	47
H. Reaksi Guru Di Kabupaten Kediri Terhadap PGRI.....	52

BAB IV ANALISIS KEHIDUPAN GURU DI KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 1980-2000	62
A. Hasil Analisis	62

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ	
DAFTAR PUSTAKA.....	69

Lampiran-Lampiran J E M B E R

DAFTAR SINGKATAN



AAP	: Asosiasi Advokat Indonesia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AGNI	: Aliansi Guru Nasional Indonesia
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BAN	: Badan Akreditasi Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DKPP	: Dewan Komisioner Pemerintah untuk Pertamina
FAGI	: Forum Aksi Guru Indonesia
FGHI	: Forum Guru Honorer Indonesia
FGII	: Federasi Guru Independen Indonesia
FGM	: Forum Guru Malang
FIGURMAS	: Forum Interaksi Guru Banyumas
FMGI	: Forum Martabat Guru Indonesia
FOGGAR	: Forum Guru Garut
FSGI	: Federasi Serikat Guru Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
GOLKAR	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
IGI	: Ikatan Guru Indonesia
IGHI	: Ikatan Guru Honorer Indonesia
JTC	: Jakarta Teacher Club
KADIN	: Kamar Dagang Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
LAP	: Lembaga Advokasi Indonesia
MCF	: <i>Million Standart Cubic</i>
OPEC	: <i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PERGURU	: Persatuan Guru Nahdatul Ulama'
PERTAMINA	: Perusahaan Tambang Minyak Negara
PGMI	: Persatuan Guru Mahardika Indonesia
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PGSI	: Persatuan Guru Seluruh Indonesia
PGSLA	: Pendidikan Sekolah Guru Lanjutan Atas
PGSLP	: Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama

PGTTI	: Perhimpunan Guru Tidak Tetap Indonesia
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SGA	: Sekolah Guru A
SGB	: Sekolah Guru B
SPG	: Sekolah Pendidikan Guru
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pembayaran
SPSI	: Serikat Pekerja Seuruh Indonesia
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret
UU	: Undang-Undang
YPLP	: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah keguruan di Indonesia telah menjadi saksi sejarah yang panjang, mulai dari masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru hingga masa Reformasi sekarang. Perguruan tinggi keguruan yang berkualitas terus meningkatkan standar pendidikan. Misalnya, pada masa awal kemerdekaan, pelatihan guru SD terdiri dari Sekolah Guru B (SGB), yang kemudian menjadi Sekolah Guru A (SGA).

Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah keguruan di tingkatkan saat kita memasuki era Orde Baru. SGB dan SGA dilebur menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). SPG tidak lagi setingkat SMP dan SPG akan dinaikkan ke SMA sederajat (SMA). Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Diharapkan pendidikan guru yang berkualitas akan menghasilkan guru yang professional dengan gelar pascasarjana di bidangnya masing-masing. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, masyarakat membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Hal yang sama berlaku bagi guru yang kemudian mengajar siswanya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan guru yang unggul, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK No. 0854/O/1989 tentang 30 lulusan. Keputusan ini menutup SPG 1990-1991².

² SK No. 0854/O/1989 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 30 lulusan. Keputusan SPG 1990-1991².

Tingkat pendidikan guru terus meningkat, dan tingkat pendidikan terkait dengan tingkat sosial ekonomi guru di masyarakat, karena orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke sekolah pelatihan guru biasanya berasal dari keluarga ekonomi lemah.

Demikian pula persepsi status sosial dan tingkat kepedulian guru sangat jelas berkaitan dengan sumber status sosial guru di masyarakat. Kesejahteraan guru yang buruk tentunya mempengaruhi tingkat sosial guru dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menganggap profesi dokter dan insinyur dianggap lebih tinggi dari profesi guru. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada masa Orde Baru dikembangkan lebih lanjut. Namun, kehidupan seorang guru telah terabaikan sebagai salah satu faktor terpenting dalam dunia pendidikan. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh guru atau organisasi Indonesia yang mengawasi guru. Saat itu, tidak ada kebebasan berserikat atau kebebasan berekspresi. Hanya integritas dan dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaannya yang memungkinkan seorang guru bertahan dalam profesinya. Oleh karenanya, untuk menghormati perjuangan para guru itulah diciptakan lagu "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa".

Guru diibaratkan sebagai profesi yang hanya mendapatkan perhatian secara moral dari pemerintah, masyarakat dan juga peserta didiknya. Namun perhatian secara moral tentu belum dapat memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan guru. Kesadaran akan penghargaan secara financial terhadap profesi guru pada akhirnya mendapat perhatian setelah banyak masyarakat

yang menyadari bahwa betapa besar dan pentingnya peran seorang guru. Dari guru akan lahir dan berkembang generasi penerus bangsa yang lebih cerdas dan memiliki wawasan keilmuan yang luas.

Orde Baru mematikan semua aktivitas dan organisasi otonom masyarakat sipil yang merupakan ciri demokrasi. Watak korporatis dan kelompok korporatis ini menjadikan kekuasaan rezim Orde Baru sebagai sebuah totalitas, dan lembaga seperti Golkar adalah unit yang dalam kesatuan utuh sebuah mesin penggilas demokrasi. Selain itu, watak kelompok korporatis ini bercirikan unit konstituennya terbatas, wadah tunggal karena memonopoli kepentingan tertentu, mewajibkan keanggotaan, diatur secara hirarkis dan direstui, bahkan diciptakan sendiri untuk dapat dikendalikan. Singkatnya, cara korporatis ini adalah kontrol yang dipaksakan atau kooptasi untuk mempertahankan kepentingan pemerintah. Kelompok korporatis seolah-olah mewakili suara masyarakat, padahal perpanjangan tangan rezim untuk memaksakan kepentingannya kepada masyarakat. Kondisi seperti itu menyebabkan tertekannya warga negara yang majemuk, tidak leluasa berserikat atau berkumpul secara merdeka, beragam dan independen. Salah satu yang terpenting adalah pengakuan atas hak-hak guru khususnya untuk menumbuh kembangkan organisasi guru yang kritis dan progresif kurang mendapat porsi

Memasuki era Reformasi terjadi euphoria baru dalam menggemakan kebebasan dan mengupayakan demokrasi setelah kehidupan masyarakat

Indonesia terkungkung selama Orde Baru³. Terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Termasuk perubahan terhadap nasib guru di Indonesia. Ketertarikan pemerintah terhadap profesi guru semakin terasa pada masa Reformasi. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Pengajar yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2005. Indonesia memiliki kompetensi pendidikan, kepribadian, teknis dan sosial, terutama dalam hal profesionalisme guru.

Kualitas guru memiliki efek cascading pada aspek pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru di tingkat nasional sangat penting untuk peningkatan kualitas guru yang berkelanjutan melalui akreditasi, kompetensi, kompetensi, dll.⁴ Seiring dengan program tersebut, itu adalah program yang sangat strategis. .Pengujian, pengembangan kurikulum regional dan nasional, peningkatan kualitas dan manajemen sekolah, pelatihan dan penilaian guru.

UU Guru dan Dosen 2005 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat guru Indonesia.⁵ Undang-undang tersebut setidaknya menekankan tiga poin penting. Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru melalui program sertifikasi. Kedua, perlindungan hukum bagi profesi guru. Ketiga, kesejahteraan guru akan meningkat. Untuk meningkatkan kualitas guru, termasuk program sertifikasi, guru harus dididik pada jenjang Strata I

³ A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta:erlangga, 1999

⁴ Kunandar, *guru profesional implementasi tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru*, Jakarta:rajawali press, hlm 16

⁵ UU Guru dan Dosen no 14 Tahun 2005

(S1). Untuk itu, guru tanpa gelar sarjana diwajibkan untuk kembali mengajar agar dapat mengikuti program yang terakreditasi. Program akreditasi meningkatkan citra dan martabat guru. Dari sebuah profesi yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dewasa ini, profesi guru mulai meningkat baik secara sosial maupun ekonomi. Ketika tingkat pendidikan meningkat dan kekayaan meningkat, nilai dan martabat profesi guru meningkat.

Penelitian tentang pendidikan guru dan kehidupan sosial ekonomi guru selalu menarik, karena masalah ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme guru sebagai pendidik. Di Indonesia, kualitas pendidik pada akhirnya menentukan kualitas pendidikan. Idealnya, profesionalisme guru meningkat bila didukung oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang memadai. Namun, benar juga bahwa ada orang yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai sebagai pendidik. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat menarik sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa bahkan pada tahun 2020 masih banyak guru informal dengan gaji di bawah rata-rata. Misalnya, sebagian besar guru sukwan Kabupaten Kediri dibayar kurang dari Rp500.000, yang tidak sesuai dengan upaya para guru dan telah membentuk karakter generasi negara. Dan di sisi lain, banyak guru yang hidup di kelas menengah kebawah, yaitu guru yang tidak hanya memiliki satu pekerjaan, tetapi dua atau tiga pekerjaan paruh waktu tergantung pada kebutuhan mereka. Dari sini, peneliti mensurvei

pensiunan guru sekolah menengah yang memasuki profesi antara tahun 1980 dan 2000 untuk menentukan apakah pola hidup mereka sama, lebih baik, atau lebih buruk dari pada sekarang.. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan kualitas hidup guru antara tahun 1980 dan 2000 hingga saatini.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti mempelajari terkuaknya kisah hidup guru di Kabupaten Kediri dari tahun 1980 hingga 2000. Pertama, dinamika perubahan dalam berbagai aspek kehidupan guru, baik aspek pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya profesi guru di Indonesia. Tingkat pendidikan guru terus meningkat. Sebagai upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, ada kebutuhan untuk memperbaiki secara kolektif sejauh mana efektivitas peningkatan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat di tingkatkan. Kedua, upaya guru dan organisasi guru untuk meningkatkan derajat sosial dan kesejahteraan profesi guru. Ketiga, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005, terdapat persoalan besar mengenai profesionalisme guru karena menghadapi tantangan zaman yang semakin maju dan berkembang.

Secara pribadi, peneliti memiliki minat khusus dalam meneliti guru di Indonesia. Terutama mengenai perubahan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya guru di Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena peneliti tidak hanya akademisi di Program Penelitian Sejarah Peradaban Islam, tetapi juga calon guru atau pendidik yang terkadang

mengurusi keguruan. Penelitian ini akan membantu guru itu sendiri untuk lebih tertarik pada profesi guru, dan akhirnya menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru, dan kualitas guru akan meningkatkan profesionalisme mereka.

Pilihan peneliti tahun 1980 hingga 2000 sebagai batas studi didasarkan pada beberapa aspek. Penelitian ini dibagi menjadi dua periode, 1980-1998 dan pasca reformasi 1998-2000. Istilah ini telah mendapat banyak perhatian secara sosial dan pendidikan. Kehidupan seorang guru secara perlahan mulai mendapat perhatian pemerintah agar profesi ini dapat ditinggikan harkat dan martabatnya sebagai profesi yang dibanggakan. Puncaknya terjadi pada 2005 ketika UU Guru dan Dosen disahkan. Batas tahun 2000 akan dijadikan tolak ukur efektifitas UU Guru dan Instruktur 2005.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti berbagai sektor pendidikan di Indonesia, khususnya perkembangan kisah hidup guru yang disebabkan oleh perubahan guru. Dengan begitu peneliti mengambil judul **SEJARAH KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI GURU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 1980-2000**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah kehidupan Guru Tahun 1980-2000?
2. Bagaimana Analisis Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru tahun 1980-2000 di Kabupaten Kediri??

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mengenai Sejarah Kehidupan Guru di Kabupaten Kediri pada tahun 1980-2000.
2. Menganalisis Sejarah Kehidupan Guru melalui kehidupan sosial dan ekonomi guru pada tahun 1980-2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah khususnya yang membahas mengenai sejarah guru, serta dapat digunakan sebagai bacaan bagi yang akan melakukan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya supaya menjadi kajian lebih lanjut.
- c. Bagi peneliti, dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai aplikasi teori yang didapat selama perkuliahan untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis. Selain itu sebagai seorang calon guru Program Studi Sejarah, peneliti memiliki kepedulian terhadap Sejarah Kehidupan Guru pada tahun 1980-2000 karena tidak ada lagi yang lebih peduli terhadap perkembangan guru selain guru itu sendiri.

- d. Bagi para guru dapat dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan konsistensi kinerja guru dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Secara Praktis

1) Untuk Penulis

Untuk memberikan kontribusi secara luas mengenai perkembangan kehidupan guru dan seputar pendidikan.

2) Untuk Lembaga (UIN KH Achmad Siddiq Jember)

Karya Ilmiah ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai Sejarah Peradaban Islam khususnya mengenai Sejarah Kehidupan Guru Tahun 1980-2000 yang sesuai dengan tujuan dari kampus UIN KH Achmad Siddiq Jember sebagai penyelenggara pendidikan ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora yang unggul dan kompetitif. Serta bisa dijadikan sebagai acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti penelitian tersebut dari aspek yang berbeda.

3) Untuk Masyarakat

Karya Ilmiah ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai Sejarah Kehidupan Guru dalam meningkatkan wawasan sejarah yang erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Selanjutnya, mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan wawasan sejarah kepada masyarakat umum.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Hasanah Ratna Dewi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Penelitian skripsi yang berjudul Guru Dua Zaman: Kajian Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Guru di Indonesia Tahun 1967-2010 penelitian ini membahas mengenai sejarah kehidupan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan guru. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai kehidupan social guru dan juga ekonomi namun dalam rentang waktu yang berbeda.
- b. Desti Wahyuni, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang Tahun 2017. Penelitian skripsi yang berjudul ⁶ “Pengaruh persepsi profesi guru, lingkungan keluarga, efikasi diri terhadap minat menjadi guru”. Jurnal ini menjelaskan tentang persepsi mahasiswa mengenai profesi guru dan minat menjadi seorang guru dan juga pandangan profesi guru dari segi ekonomi. Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai profesi guru dan dilihat dari segi kehidupan ekonomi
- c. Afina Murtiningrum, SS, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro Tahun 2005. Penelitian tesis yang berjudul Analisis pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap stress kerja

⁶DestiWahyuni/*Economic Education Analysis Journal* 6(3)(2017) 2252-6544

dengan dukungan sosial sebagai variable moderasi (Studi kasus pada guru kelas 3 smp negeri di kabupaten Kendal)

.penelitian ini menjelaskan mengenai konflik sosial dan ekonomi mengenai kehidupan seorang guru. Persamaan dari penelitian diatas ialah sama-sama membahas mengenai kehidupan sosial guru juga ekonomi dimana dalam penelitian diatas guru memiliki tingkat stress yang cukup tinggi efek dari kebutuhan ekonomi dan sosial.

- d. Maretha Riana Ramdhani, Program Studi Magister Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017.⁷ Penelitian tesis yang berjudul “Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial dan Ekonmi Guru di Kabupaten Ngawi”. Jurnal ini menjelaskan tentang dampak dari sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi guru. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kehidupan sosial guru dan juga kehidupan ekonomi guru .

2. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori sosial. Teori Sosial merupakan penulisan sejarah yang muncul pada tahun 1950-an. Dalam teori sosial, ini mempunyai bahan tulisan yang sangat luas dan beraneka ragam. Teori sosial ini sangat fleksibel dimana bisa dikombinasikan dengan beberapa

⁷Maretha Riana Ramdhani”*Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*- volume 2 nomor 1, maret 2018:106-129

pengetahuan seperti pengetahuan ekonomi yang menjadi sejarah sosial-ekonomi.

Banyak sekali sarjana-sarjana Prancis yang menjadi pelopor adanya sejarah sosial. Dalam penelitian sejarah sangat banyak yang dapat dikerjakan, selain yang meneliti masyarakat secara total atau global. Teori ini digunakan peneliti karena dirasa cocok dengan apa yang akan diteliti, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan kehidupan sosial guru yang terjadi pada tahun 1980-2000 yang dimana menggunakan informan beberapa guru sekolah yang telah purna tugas/pensiun.

Teori *The Challenge and Respons* oleh Arnold J. Toynbee menjelaskan tentang bagaimana hubungan sebab akibat yang muncul karena suatu kejadian. Teori *Challenge and Respons* yang dicetuskan oleh Arnold J. Toynbee berdasarkan penelitian terhadap kebudayaan yang sempurna serta Sembilan jenis kebudayaan yang kurang sempurna. Kebudayaan yang sempurna, meliputi Yunani, Romawi, Hindu, Maya, dan Barat/Eropa, sedangkan kebudayaan yang kurang sempurna yaitu Eksimo, Polinesia, Sparta dan Turki. Kesimpulan yang diambil oleh Toynbee menerangkan bahwa gerak sejarah tidak memiliki hukum tertentu yang menguasai serta mengatur timbul maupun tenggelamnya kebudayaan-kebudayaan yang pasti. Teori *Challenge and Respons* digunakan peneliti karena dirasa sangat cocok untuk membedah permasalahan yang sedang dikaji peneliti, karena challenge atau tantangannya, mengungkapkan kehidupan guru pada tahun 1980-2000 ada

mengalami krisis ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan menggunakan teori *Challenge and Respons* ini, peneliti akan menganalisa tantangan dan tanggapan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan guru didesa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan mengumpulkan data yang latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *design research* dan *case study*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial dan kebudayaan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi yang lain.⁸ Sedangkan, deskriptif menunjukan jika tujuan penelitian adalah suatu penelitian yang memberikan sebuah penjelasan yang sangat rinci agar lebih mendalam tentang suatu masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan metode yang sesuai dengan topik yang akan diteliti oleh penulis, dengan memaparkan bagaimana Sejarah Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru di Kabupaten Kediri tahun 1980-2000. Adapun studi kasus yang

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8-9.

dijadikan sebagai titik penelitian oleh penulis ialah di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau di kediaman narasumber. Penerapan dalam penelitian ini ialah untuk menggali dan mencari data sebanyak-banyaknya yang kemudian dinarasikan dan diuraikan data dari narasumber menjadi sebuah karya ilmiah penelitian, data yang diperoleh dari informan ialah baik berupa data lisan maupun data tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Rekaman audio/Voice note
2. Dokumentasi

G. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Brenggolo. Desa tersebut merupakan desa yang terletak di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Dimana di lokasi tersebut terdapat kediaman narasumber yang akan digali informasinya. Penulis tertarik menggali informasi di daerah tersebut dikarenakan lokasi tempatnya yang dekat dengan kediaman peneliti di samping itu di lokasi tersebut terdapat beberapa pensiunan guru sekolah yang dahulu aktif pada tahun 1980 sampai 2000. Peneliti juga tertarik di lokasi tersebut karena untuk mencari data mengenai informasi seputar kehidupan guru tahun 1980-2000 tersebut sangat membantu peneliti karena dekat dengan kediaman peneliti.

Selain itu penelitian ini juga tergolong penelitian baru yang ada di kampus UIN KHAS Jember, sehingga kenapa tidak, kalau bisa dijadikan

sebagai karya tulis ilmiah, terutama mengenai studi kasus berkaitan dengan keguruan yang dimana profesi peneliti ialah seorang guru di madrasah yang ada di Jember.

Mengapa peneliti mengambil periode 1980 sampai 2000? Peneliti mengambil periode 1980 sampai 2000 karena pada saat itu pendidikan di Indonesia bisa dikatakan unggul diantara Negara-negara ASEAN lainnya. Namun apakah hal tersebut diimbangi dengan sejahteranya kehidupan guru pada periode tersebut, juga peneliti melihat di tahun sekarang masih banyak guru-guru yang hidup dalam kehidupan menengah kebawah, dan hanya beberapa saja yang bisa dikatakan sejahtera, sehingga membuat peneliti tertarik meneliti pada periode tersebut sebagai perbandingan apakah pada masa kini kehidupan guru sama dengan kehidupan guru pada tahun 1980 sampai 2000, ataukah terdapat peningkatan atau penurunan mengenai kesejahteraan guru masa sekarang jika dibandingkan dengan tahun 1980-2000.

H. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pensiunan guru tahun 1980-2000 di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini mendeskripsikan tentang sejarah kehidupan secara ekonomi sosial, dan peran guru pada periode tersebut

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pensiunan guru tahun 1980-2000 yang ada didesa Brenggolo Kecamatan

Plosoklaten Kabupaten Kediri, selain itu wawancara digunakan untuk bertujuan memperoleh informasi yang dicari oleh penulis, dan merupakan salah satu jalan untuk memperlancar observasi ini.⁹ Untuk membantu mengumpulkan Informasi mengenai sejarah guru pada periode tersebut peneliti juga menggunakan data sekunder, seperti buku dokumen, jurnal, skripsi, yang membahas mengenai penelitian sejarah guru.

1. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang penulis lakukan dalam mengungkapkan fakta sejarah adalah dengan menggunakan metodologi penelitian sejarah atau metode *historis*. Metode *historis* merupakan metode pengujian dan menganalisa secara kritis tentang rekaman peninggalan yang telah lampau. Poin penting yang akan dipaparkan sesuai dengan bentuk, kajian, suasana dan masanya.

a. Menentukan tema

Dalam penelitian ini harus menentukan tema terlebih dahulu

tema mana yang sesuai dengan penelitian sejarah. Pemilihan tema harus berdasarkan konsep yang akan diteliti. Konsep yang sesuai dengan penelitian harus mengumpulkan sumber untuk menentukan tema penelitian sejarah.

b. Heuristik

Menurut Notosusanto, heuristics berasal dari bahasa Yunani

heuriskein, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya

⁹Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, 129

menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahapan ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Pada tahap pertama, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.¹⁰

Heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah, yaitu aktivitas pengumpulan sumber data sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sejarah berupa sumber lisan atau wawancara dan sumber tertulis yang berupa jurnal sejarah.

Berbagai data sumber-sumber yang terkait meliputi:

1) Sumber Lisan

Sumber lisan merupakan sumber informasi yang disampaikan secara langsung oleh pelaku sejarah atau informan mengenai kehidupan guru. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencari informasi dengan mendatangi langsung kediaman pelaku sejarah (narasumber) dan melakukan wawancara kepada narasumber tersebut, hal tersebut dilakukan penulis untuk mendapatkan

¹⁰Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung Pustaka Setia, 2014), 93.

informasi yang akurat dan berbagai penjelasan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

2) Sumber Tulisan

Sumber tulisan merupakan sumber informasi yang didapatkan berupa tulisan. Tulisan dalam sumber ini dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi yang dibuat oleh tangan pertama dalam waktu yang relative sama dengan peristiwa sejarah. Adapun data primer ini biasanya berupa arsip, surat perintah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tulisan berupa jurnal sejarah.

c. Kritik Sejarah

Kritik sejarah memiliki dua macam, yaitu: autentisitas, atau keaslian sumber, kritik eksternal dan kredibilitas atau kebiasaan yang dapat dipercaya yang disebut dengan kritik internal.¹¹ Kritik internal dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber.

Kredibilitas sumber, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Sedangkan, kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentikan sumber sejarah.

Dalam melakukan kritik internal, penulis mencoba membandingkan informasi dari data satu dengan data yang lain untuk memudahkan di relevansikan¹² dengan data yang terkait, baik dari data sumber tertulis atau tidak tertulis, sumber lisan atau tulisan merupakan sumber

¹¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 77.

¹² Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

tertulis dengan sumber tidak tertulis yang memuat informasi seputar Sejarah Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru Tahun `1980-2000

Dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan dari narasumber yang penulis dapatkan terkait dengan sejarah guru sekolah menengah pertama akan dibandingkan satu sama lain untuk menemukan dan mendapatkan dokumen serta keterangan yang paling otentik. Selain melakukan kritik internal, penulis juga melakukan kritik eksternal dengan memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli ataupun salinan.

d. **Interpretasi**

Interpretasi adalah analisis mengenai makna atas sumber sejarah atau data sejarah yang berhasil dikritik oleh penulis. Analisis yang dilakukan oleh penulis harus bersifat objektif dan jika membutuhkan sikap yang subjektif maka penulis harus memiliki sikap subjektif yang lebih rasional. Kejadian sejarah yang disampaikan harus bisa menghasilkan sejarah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran. Analisis yang dilakukan oleh penulis tidak boleh menyimpang.

Dalam interpretasi sejarah ada dua tahapan jika ingin melakukan interpretasi ini adalah dengan cara analisis dimana penulis harus menguraikan data atau sumber yang didapatkan. Kemudian cara yang kedua dengan sintesis dimana penulis harus menyatukan data-data

atau sumber-sumber sejarah yang didapatkan guna bisa memberikan analisis yang telah tervaliditas bagi penulis.

e. Historiografi

Historiografi menjadi tahapan yang terakhir dalam penelitian sejarah. Dimana dalam proses penulisan ini menggunakan kemampuan penulis dalam metode yang digunakan karena akan mempengaruhi hasil historiografi. Tidak hanya menuliskan laporan, namun penulis juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam memahami sejarah dan hasil dari penelitiannya. Dalam melakukan tahapan ini hendaknya penulis memberikan gambaran yang jelas dari tahap awal (perencanaan) hingga tahap akhir (pembuatan kesimpulan).¹³

Setelah melakukan tahapan interpretasi data tentang sejarah dan perkembangan Mengenai Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru di Kabupaten Kediri, selanjutnya penulis akan menuliskan laporan penelitian kedalam karya tulis ilmiah yang penulisannya akan dibagi kedalam lima bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu skripsi mengenai Sejarah Kehidupan Guru Tahun 1980-2000

2. Analisis Data

a. Interpretasi atau Penafsiran

Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan oleh peneliti: analitis dan sintetik. Analisis berarti menggambarkan, komposisi berarti

¹³ FitriDewanty, "SejarahKelas 10: Historiografi Dan MetodePeneliitian Sejarah" , [https://pahamify.com/blog/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/\(20_November_2021\).](https://pahamify.com/blog/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/(20_November_2021).)

menggabungkan. Analisis sejarah sendiri bertujuan untuk menyatukan sekumpulan fakta yang berasal dari sumber-sumber sejarah dan teori-teori yang mengikuti fakta-fakta tersebut kedalam suatu interpretasi sintetik atau kompleks. Dalam proses memaknai sejarah, peneliti harus berusaha memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Satu penyebab dapat menyebabkan hasil tertentu, sedangkan penyebab yang sama dapat menyebabkan hasil yang berlawanan dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan membandingkan data untuk menentukan peristiwa mana yang terjadi pada waktu yang sama. Menentukan penyebab peristiwa penting secara historis membutuhkan pengetahuan tentang masa lalu sehingga peneliti dapat mengetahui aktor, tindakan, dan konteks peristiwa.

Penulis juga harus pandai dalam melakukan proses interpretasi. "Kamar gelap bersejarah" sering muncul karena faktor sejarah tidak pernah sempurna. Seorang penulis harus mencoba membayangkan suatu periode waktu sehingga ia dapat merasakan dan membayangkan apa yang terjadi di masa lalu. Fakta-fakta yang terkumpul digabungkan dan ditafsirkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah kehidupan guru di Kabupaten Kediri daritahun 1980 hingga 2000.

b. Historiografi

Historiografi adalah usaha untuk menulis sejarah secara berurutan melalui serangkaian heuristik, verifikasi dan interpretasi dan menyajikannya dalam tulisan atau historiografi. Sejarah adalah penyajian interpretasi tertulis dari fakta. Sejarah dapat dikatakan sebagai puncak dari rangkaian karya seorang sejarawan, dan dari tahap ini kita dapat melihat baik buruknya keseluruhan karya tersebut. Oleh karena itu, menulis membutuhkan kemampuan untuk mengorganisasikan fakta-fakta yang terfragmentasi kedalam kalimat yang sistematis, utuh dan komunikatif. Dalam historiografi, aspek kronologis sangat penting dalam historiografi modern (kritik sejarah). Sejarawan yang berkompeten tidak lagi berpegang pada formulasi naratif atau deskriptif, tetapi mengarah pada bentuk analitis. Ini karena mereka dianggap lebih ilmiah dan dapat memberikan informasi yang lebih baik daripada sejarawan tradisional dengan sejarah naratif.

Proses penyusunan sejarah kehidupan guru 1980-2000 dan faktor-faktor yang terkait dengan perannya dalam bidang pendidikan dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sumber diperoleh melalui teknik data mining, kritik sumber, dan interpretasi, setelah itu laporan karya ilmiah disajikan dalam bentuk peristiwa atau narasi sejarah.

3. Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber data*. *Triangulasi sumber data* dapat diartikan sebagai

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan perubahan data dengan *triangulasi* untuk mengumpulkan data yang sekaligus munguji kredibilitas data, yaitu dengan langkah-langkah pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

4. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap ini dilakukan oleh peneliti sebelum terjun kelapangan. Peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal. Ada beberapa hal yang diperlukan sebelum melakukan terjun langsung kelapangan, yaitu: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki serta menilai keadaan lapangan, memilih informan, dan juga menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung kelapangan memulai suatu penelitian dan menggali data-data dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN.

Penulis membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Setting dan Latar Belakang Sejarah Kehidupan Guru.

Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang latar belakang permasalahan yang menyebabkan terjadinya progress yang signifikan dalam menyangkut kehidupan guru pada masa tersebut

BAB III Nasib Guru Dan Kehidupannya (1980-1998), Reformasi Dan Perbaikan Struktural(1998-2000).

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan mengenai kehidupan guru pada tahun 1980-2000 beserta dengan hasil temuan dilapangan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan mengenai kehidupan guru beserta dampak yang dihasilkan.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab terakhir ini adalah bagian penutup, penulis menyajikan kesimpulan terhadap keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

SETTING dan LATAR BELAKANG SEJARAH KEHIDUPAN GURU

A. Periode Awal *OIL BOOM* Indonesia

Masalah ekonomi Orde Lama pada pemerintahan Presiden Soekarno menjadi beban berat di bawah pemerintahan Presiden yang baru yakni Presiden Soeharto, dan kondisi ekonomi yang kacau setelah Supersemar pada tahun 1966 membuat pemerintah saat itu mencari cara untuk mengatasi inflasi yang sangat besar. Inflasi yang tinggi membawa situasi ekonomi Indonesia kedalam krisis yang sangat serius saat itu. Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 adalah buktinya¹⁴. Selain itu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) setahun kemudian, dengan demikian, untuk memulihkan situasi ekonomi yang lebih baik dan juga melakukan upaya untuk berbagai sektor. Untuk investor dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan membuka seluas-luasnya penanaman modal kepada penanam modal dalam dan luar negeri, maka Orde Baru disebut masa industrialisasi. Hal ini dilakukan Presiden Soeharto untuk meredam inflasi dan memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia saat itu. Untuk jangka waktu setelah pembukaan kebijakan investasi, pertumbuhan ekonomi cukup luar biasa. Diantaranya, beberapa profesi seperti pertanian dan perdagangan mengalami pertumbuhan, dan beberapa profesi mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan yang

¹⁴ Intruksi Presidium Kabinet no.36/U/IN/1967 Tentang Pemberian Perangsang-Perangsang Khusus Penanaman Modal Asing yang Mengadakan Kerjasama Dalam Bentuk Joint Enterprise tanggal 3 juni 1967

cukup besar tersebut diisi oleh profesi pertambangan, khususnya ekstraksi minyak, yang membuat Negara pada waktu itu mengalami awal pemerintahan yang gemilang di bawah Orde Baru. Hal ini memungkinkan negara pada saat itu mengalami boom ekonomi yang disebabkan oleh minyak, yang dikenal sebagai *oil boom*, yang berdampak besar pada sektor ekonomi. Di era ini juga untuk pertama kalinya dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,8%. Ledakan ekonomi yang dibawa oleh minyak terasa seperti rejeki nomplok di Indonesia, yang telah memberi Indonesia surplus ekonomi yang sangat besar.

Kegiatan ekstraksi minyak yang dikelola oleh Perusahaan Tambang Minyak Negara (pertamina) berkembang pada tahun 1970-an¹⁵. Situasi politik dalam negeri yang stabil, dan permintaan pasar dunia terhadap produksi minyak Indonesia (market demand) terus meningkat, yang menyebabkan peningkatan investasi asing di Indonesia. Hal ini juga berdampak langsung pada kegiatan di luar ekstraksi minyak. Pada tahun 1970, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 311,549 juta barel. Angka tersebut belum termasuk produksi minyak sulingan, minyak sulingan, dan gas alam cair yang berjumlah 854.000 barel pada tahun 1970. Pada tahun 1971, Pertamina yang menjadi Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan mengelola ekstraksi minyak Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang tinggi. Jika dihitung dari produksi minyak mentah saja, Pertamina telah memproduksi 39.286.997 barel. Angka tersebut belum termasuk dalam hasil kontrak bagi hasil yang dilakukan Pertamina saat

¹⁵ Bartlett. 1986. Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional. Yayasan Idayu: Jakarta.hal 23

itu. Menurut catatan, pada tahun 1971, Pertamina mulai menandatangani kontrak kerjasama dengan 6 perusahaan asing berdasarkan kontrak bagi hasil dari 35 perusahaan yang menandatangani kontrak dengan Pertamina. Perusahaan-perusahaan ini, yang beroperasi di area lepas pantai dan darat, adalah Conoco, Calasiatic, Caltex Pacific Indonesia, Arco, Shell dan Stanvac.

Selain itu, Pertamina telah bermitra dengan perusahaan Jepang Mitsui Marubeni pada proyek “Pengembangan Produksi untuk Proyek Djatibarang”. Pembangunan stasiun produksi minyak, jaringan pipa darat dan bawah laut, serta fasilitas perkantoran, hotel terapung dan tempat tinggal staf menjadi proyek yang ditargetkan pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1971, Presiden Soeharto memberikan tugas kepada Pertamina untuk membangun Batam sebagai kawasan iindustri dan wisata yang sedang berkembang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971¹⁶, Pertamina telah menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Pada Repelita tahap pertama, Pertamina diharapkan menjadi tulang punggung proses pembangunan. Pertamina juga berperan sebagai perusahaan dalam perkembangannya, melalui fungsinya sebagai *public service obligation*.
K Perusahaan minyak telah mendirikan berbagai fasilitas pelayanan seperti pembangunan rumah sakit dan pembangunan stasiun radio. Bahkan Pertamina membekali tentara Indonesia dengan alat komunikasi.

Pertamina memang diberi tugas khusus atas perintah pemerintah sendiri. Dalam penugasan khusus ini, Pertamina diharapkan dapat mendukung

¹⁶ UU No. 8 Tahun 1971

kegiatan pertanian yang menjadi agenda penting Repelita I. Tidak hanya mencakup bidang penelitian, perencanaan dan pelaksanaan, distribusi pasokan, penyediaan pupuk, dan lain-lain, tetapi juga bidang teknis, yang melibatkan tenaga ahli dan menyediakan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Sejak tahun 1970, Pertamina sebenarnya telah mengalami goncangan besar dari masyarakat. Masalah korupsi yang melanda Pertamina cukup mengganggu Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu agen pemerintah yang sedang berkembang. Hingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pertamina pada tahun 1971, masyarakat cukup puas dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan undang-undang ini.

Memasuki tahun 1972, Pertamina memiliki berbagai tujuan yang ingin diwujudkan selama periode ini. Sebagai catatan, sejak akhir tahun 1971, Pertamina berencana membangun berbagai fasilitas untuk meningkatkan kinerja produksi tahun 1972. Pembangunan Fasilitas Lapangan Serang Djaja, penambahan fasilitas produksi di Pulau Tabuhan, Lantau; dan Lee Tabue, perbaikan lift gas di Rantau, serta proyek perluasan dan peningkatan sektor **K** gas alam. Hal ini terbukti mampu meningkatkan kinerja produksi beberapa lapangan dan mendorong berkembangnya proyek-proyek gas yang diprakarsai Pertamina. Mencapai 471.644 barel, kemudian meningkat menjadi 4.404.920 barel pada tahun 1972. Kemudian pada akhir tahun 1972, produksi minyak mentah Pertamina dari minyak mentah saja mencapai 63.438.645 barel. Kemudian produksi gas bumi Indonesia juga meningkat pada tahun 1972,

dimana Pertamina hanya memproduksi 70.421.502 MCF gas alam pada tahun 1971, meningkat menjadi 146.478.901 MCF pada tahun 1972. Hasil ini tentunya sesuai dengan ekspektasi Pertamina. Pertamina juga meningkat pada tahun 1972 dengan ditandatanganinya kontrak baru dengan 2 perusahaan asing lainnya, yaitu *Indonesia Offshore Operations* di wilayah Irian Barat, serta Total Indonesia di wilayah Sumatera Tengah (meliputi daerah eksStanvac). Pertamina dan kontraktor juga telah menemukan sumber minyak baru. Kontraktor biasanya menemukan sumber daya minyak baru di lepas pantai, sebagian di darat. Pertamina dan kontraktor asing telah menemukan sekitar belasan sumber minyak baru. Ditemukannya sumur-sumur tersebut tentunya akan meningkatkan kapasitas produksi Pertamina. Sumur-sumur baru ini dapat ditemukan di seluruh Kalimantan, Sumatera, Irian Barat, bahkan di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan.

Pertamina juga resmi memiliki Dewan Komisioner Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). DKPP dibentuk untuk bekerja menuju implementasi UU No. 1. 1971 Nomor 8. Pemerintah juga mengangkat anggota DKPP pada tanggal 4 Maret 1972. DKPP terdiri dari Menteri Pertambangan sebagai Ketua DKPP, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua DKPP, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas yang merupakan anggota DKPP. Fungsi DKPP adalah mengawasi berbagai kegiatan Pertamina. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan di bidang pengembangan usaha, mencari modal usaha, dan mengawasi laporan penjualan yang dihasilkan oleh Pertamina. Hingga tahun 1972, utang Pertamina yang dilaporkan hanya

\$749.502, angka yang turun daritahun 1971 menjadi \$749.502 di Amerika Serikat. \$831.349. Sementara itu, pendapatan Pertamina tumbuh secara substansial antara tahun 1971 dan 1972, dengan Pertamina hanya menerima \$197.654.000 pada tahun 1971, kemudian meningkat menjadi \$336.645.000 pada tahun 1972. Sepanjang tahun, Pertamina juga mendirikan beberapa fasilitas. Tercatat beberapa sekolah di wilayah Sumut merupakan sumbangan dari Pertamina untuk masyarakat, yang kemudian disumbangkan ke RS Kosambi Cirebon, serta pembangunan gereja di Irian Barat. Hingga akhir tahun 1972, Pertamina masih dalam tahap re-organisasi. Hingga pada pertengahan tahun 1973, Pertamina mengalami masa kejayaan dengan peristiwa *oil boom* yang disebabkan embargo minyak dari negara OPEC di Timur-Tengah. Pertamina pun saat itu mengalami kenaikan produksi dan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dari sektor migas. Hal ini berimbas pada penerimaan devisa Negara yang meningkat sekitar 71% dari sektor migas saja.

B. Oil Boom 1973-1975

Pada periode sekitar tahun 1970 kerap disebut sebagai era emas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dari sektor minyak yang melimpah, Indonesia dapat memberikan dana untuk pembangunan Negara¹⁷. Defisit anggaran dalam pembangunan seperti tahun sebelumnya tidak menjadi masalah. Namun perjalanan ekonomi Indonesia tidak juga mudah. Setelah Perang Dunia II, status minyak dalam

¹⁷ <https://validnews.id/ekonomi/Terjebak-Booming-Minyak-Gvw>

perekonomian nasional semua negara di dunia menjadi sangat penting. Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara Eropa lainnya bersaing untuk mendapatkan pasokan minyak dari seluruh dunia. Mereka mencoba mengeksplorasi sumur minyak di negara mana pun. Ini dilakukan selama Perang Dingin untuk memperebutkan kepentingan mereka. Mereka bersaing memperebutkan minyak di Timur Tengah. Antara tahun 1948 dan 1967, Timur Tengah mengalami berbagai konflik yang sangat besar. Perang mereka dengan Israel dan sekutunya terjadi di tanah yang dipenuhi minyak ini. Alasan konflik termasuk status negara Israel yang tidak mereka akui, sumber air, perbatasan, masalah Palestina, dan yang paling umum, masalah minyak. Setelah memenangkan Perang Dunia, Amerika Serikat menjadi negara adidaya dengan Uni Soviet. Amerika Serikat berusaha untuk turut ampur tangan dalam urusan Timur Tengah melalui berbagai strategi intervensi politik. Amerika Serikat melakukan intervensi dalam urusan Timur Tengah sejak tahun 1948, ketika negara Israel didirikan. Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel sebagai negara dan menduduki sebagian dari tanah Palestina. Tentang keras dari negara-negara tingkat tinggi, pada tahun 1967, Amerika Serikat secara eksplisit memberikan bantuan militer kepada Israel dalam menanggapi Perang Enam Hari yang terjadi sejak Juni 5, 1967 hingga 10 Juni 1967. Dalam insiden ini, Israel menerima bantuan AS di bidang senjata modern. Ketertarikan pada minyak sudah terlihat sejak 22 Mei 1967, ketika kapal-kapal pengangkut minyak ke wilayah Mesir melewati Selat Tiran. Saat itu, Mesir memblokir akses ke Selat Tiran untuk mencegah Israel mendapatkan minyak.

Menurut Israel, tindakan ini melanggar hukum internasional. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu pecahnya perang yang berujung pada trilogi perang yang berkecamuk di Timur Tengah saat Perang Yom Kippur pada 6 Oktober 1973. Negara-negara Arab marah karena AS ikut campur dalam politik Timur Tengah. Pada 19 Oktober 1973, Arab Saudi mengumumkan pengurangan 25% dalam produksi minyak dan mengumumkan embargo terhadap Amerika Serikat pada \$ 1,17 per barel menjadi \$ 7 per barel.

Industri Amerika pada saat itu membutuhkan pasokan minyak tetapi runtuh di bawah embargo Timur Tengah. Perkembangan industri di Amerika Serikat membutuhkan pasokan energi yang besar. Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara Eropa yang bersekutu dengan Amerika Serikat merasakan hal yang sama. Krisis energi sedang terjadi di Barat. Prancis, yang menggunakan ribuan lampu hias untuk menghiasi Menara Eiffel, langsung meredup karena kebijakan hemat energi. Upaya AS untuk menciptakan anti-kartel untuk menangani embargo Timur Tengah telah gagal. Sekutu AS di Eropa tidak ingin menjadi kambing hitam atas kebijakan AS. Sementara itu, Jepang mengalami gejala tersebut sejak tahun 1969 dan mengembangkan serta menjalin kemitraan dengan Indonesia pada awal tahun 1960. Sejak tahun 1969, mereka telah mengembangkan teknologi gas alam sebagai sumber energy alternatif. Dalam hal ini, Jepang tidak mengalami kekurangan pasokan energy sedikitpun. Melihat Jepang dalam posisi aman saat krisis energi, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya mencari minyak baru yang berpotensi untuk mencapai pasokan energy. Amerika

adalah negara yang dikenal sebagai pecandu minyak. Semua elemen kegiatan ekonomi AS didasarkan pada energi minyak bumi. Industri, sistem transportasi, komunikasi dan perdagangan adalah sektor utama di mana mereka melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan pertahanan mereka, bahkan ketika mereka terkomputerisasi selama Perang Dingin, masih berbasis bahan bakar. Keamanan pasokan minyak AS akan mempengaruhi ketahanan kondisi ekonominya. Jika pasokan minyak terganggu, ekonomi mereka pasti akan terganggu

Sejak pecahnya perang Timur Tengah pada awal Oktober 1973, permintaan minyak Indonesia di pasar dunia semakin meningkat. Sebelumnya pada awal tahun 1971, Indonesia sebenarnya telah menandatangani beberapa kontrak bagi hasil dengan 35 perusahaan di bawah 45 kontrak yang diusulkan, ketika nilai investasi yang direalisasikan adalah US\$456 juta. Sungguh angka yang luar biasa saat itu. Jumlah ini terus bertambah hingga tahun 1973, setelah itu beberapa kontrak dilaksanakan berdasarkan persyaratan kontrak. Investor dari Jepang telah menyepakati kontrak yang telah terjalin sejak 1969, khususnya berfokus pada eksplorasi minyak dan gas bumi sebagai sumber energi baru. Beberapa perusahaan asing dari Amerika dan Eropa berbondong-bondong mencari pasokan minyak ke Indonesia. Saat itu, keadaan krisis energi yang melanda dunia mendorong Indonesia untuk menyetujui sistem kontrak minyak baru yang diperkenalkan. Beberapa perusahaan asing sebelumnya telah ke Indonesia untuk melakukan eksplorasi. Shell, Chevron dan Exxon adalah beberapa perusahaan minyak Indonesia yang telah melakukan

penelitian di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Saat itu, minyak Indonesia menjadi primadona bagi pembeli dan investor asing. Meningkatnya permintaan minyak Indonesia tidak hanya disebabkan oleh embargo yang diberlakukan oleh Timur Tengah, tetapi juga karena harga dan kualitas minyak Indonesia yang murah dan biasanya rendah sulfur.

Saat itu, harga minyak mentah berada di kisaran \$2 per barel. Harga ini diterapkan dari tahun 1971 hingga pertengahan tahun 1973. Pada tahun 1973, ketika krisis energi melanda pada pertengahan Oktober tepatnya, harga minyak dunia naik menjadi US\$3,29 per barel.

Selama triwulan 1 dan 2 tahun 1974/1975, ekspor sektor migas Indonesia kembali meningkat. Pada semester pertama tahun ini saja, ekspor minyak mencapai \$2,575 miliar. Kemudian mencapai nilai US\$2,578 miliar pada paruh kedua tahun ini. Total ekspor minyak selama periode ini berjumlah \$5,153 juta. Sektor migas mencatatkan peningkatan nilai ekspor dalam kegiatannya sepanjang tahun 2017. Tentu saja ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi industri migas Indonesia. Saat itu, keuntungan dari penjualan minyak digunakan sebagai dana investasi dan pembangunan di sektor, daerah, dan daerah. Peningkatan devisa dari sektor migas belum tentu berdampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Uang yang beredar di Indonesia juga meningkat pada saat oil boom. Hal ini menyebabkan inflasi dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Ada pula gaung gerakan anti korupsi yang berkembang pada era 1969 dan semakin gencar saat *oil boom*.

Rekor produksi minyak yang mampu mendatangkan 70 visa nasional antara tahun 1973 dan 1975 sebenarnya merupakan pencapaian yang sangat membanggakan, karena pemasukan devisa negara dari sektor industry minyak melonjak. Pertamina dikatakan memiliki lebih dari \$ 10,5 miliar utang pada saat itu. Jumlah ini juga termasuk sejumlah kecil sindikat AS dan belum termasuk bunga. Utang yang seharusnya dilunasi pada tahun 1974-1975, namun Pertamina tidak mampu melunasi utang tersebut hingga tenggat waktu¹⁸. Korupsi yang terjadi di lingkungan Pertamina sangat kuat. Hal ini sebenarnya telah disebutkan oleh Harian Indonesia Raya sejak tahun 1969. Sejak pemecatan Menteri Pertambangan Bratanata pada tahun 1967, Presiden Soeharto menaruh kepercayaan penuh pada aturan Pertamina kepada Ibnu Sutowo. Patronase politik yang kuat berkembang antara Ibnu Sutowo dan Presiden Suharto, keduanya berlatar belakang militer.¹⁹ Sejak kejadian itu, Pertamina seakan menjadi sapi perah pemerintah rezim Orde Baru yang digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok militer dan kroni-kroninya. Pertamina juga tidak melaporkan segala macam kegiatan dan laporan keuangannya kepada pemerintah sejak tahun 1967. Sehingga negara tidak mengetahui sedikit pun bagaimana kondisi didalam tubuh Pertamina.

¹⁸ Lihat Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul: *"Krisis, Komisi dan Ibnu Sutowo"*

¹⁹ *Harian Kompas Tgl 13 Januari 2001 "Mozaik Perjalanan Ibnu Sutowo": Elza Astari Retaduari*

BAB III

GURU DAN PEKERJAAN SAMPINGAN

A. Pendidikan Guru & Ekonomi Guru

Oil boom telah mengubah struktur ekonomi Indonesia saat itu menjadi lebih baik dimana setelah terjadinya krisis ekonomi yang disebabkan oleh Pemerintah Orde Lama dan juga inflasi yang tinggi, berhasil ditundukkan oleh Pemerintah Orde Baru melalui penjualan minyak bumi. Hal ini berpengaruh pada seluruh sektor yang menjadi fokus penting dalam pembangunan Negara Indonesia, salah satunya ialah dalam hal kepegawaian. Efek dari ledakan harga minyak ini membuat negara pada saat itu membutuhkan banyak sekali pegawai yang akan menangani sektor penting Negara. Ada sektor di bidang perminyakan, sektor administrasi negara dan salah satunya sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan fokus pemerintah saat itu ialah membangun sekolah dan juga mengangkat banyak sekali tenaga profesi keguruan. Pemerintah mendorong masyarakat Indonesia untuk memasuki sekolah yang memiliki jurusan profesi guru, terdapat PGSD, PGSLP, dan juga PGSLA yang dimana sekolah tersebut adalah sekolah profesi guru berdasarkan tingkatan sekolah. Pada awalnya profesi seorang tenaga pendidik atau guru di Indonesia tidaklah menjadi profesi yang menjanjikan dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali guru-guru yang memiliki kehidupan jauh dari kata layak. Hal ini seperti terjadi pada periode tahun 1970-1980 guru dianggap sebagai profesi masyarakat kalangan bawah, sehingga saat itu dipandang sebelah mata. Hal ini diungkapkan oleh narasumber dimana profesi ini lumayan sedikit di

Kediri. Pada masa tersebut sudah terdapat sekolah yang berkaitan dengan profesi guru, ada Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), ada Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dan juga Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA). Namun pada masa itu sekolah profesi guru ini belum banyak diminati, hal ini dikarenakan sekolah profesi guru ini dipandang sebelah mata dan hanya diperuntukkan kepada masyarakat menengah kebawah saja, sampai pada akhirnya sekolah profesi guru ini diganti nama menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Setelah pergantian nama dari PGSLP dan PGSLA menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru) juga tidak membuat bertambahnya siswa yang ingin menjadi guru, sampai pada akhirnya kebutuhan guru sangat dibutuhkan pada tahun 1976 imbas dari efek oil boom di Indonesia, pemerintah mendirikan 6.500 sekolah pada masa orde baru. Sehingga terjadi perekrutan besar-besaran mengenai profesi guru, tak tanggung-tanggung di Indonesia terdapat 82 SPG yang tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 1976 ditingkatkan menjadi 162 (Seratus Enam Puluh Dua) SPG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan terdapat satu di Kediri. Hal tersebut cukup efektif karena lumayan banyak siswa yang bersekolah untuk profesi guru. Pada saat itu setelah banyaknya guru yang menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di 6.500 (Enam Ribu Lima Ratus) sekolah yang tersebar di Indonesia tidak serta merta membuat kehidupan guru terjamin, hal tersebut dibuktikan masih banyak guru yang mencari pekerjaan sampingan selain menjadi guru.

Ekonomi negara Indonesia saat itu memang secara sangat *surplus* sekali, namun tidak menjamin profesi guru mendapat kesejahteraan yang layak.²⁰ Dengan peristiwa meledaknya harga minyak dunia dan juga eksplorasi minyak yang melimpah di Indonesia tidak serta-merta membuat kesejahteraan guru meningkat. Mungkin jika guru tersebut menjadi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat itu sedikit memberikan kesejahteraan yang cukup layak dilingkungan guru, namun bagi guru swasta, selain profesi guru juga harus memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kesejahteraan kehidupan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber yang saat itu menjadi seorang tenaga pendidik (guru) sekaligus menjadi kepala sekolah di sekolah menengah pertama mengatakan:

“penghasilan guru sesuai dengan dana yang masuk dari siswa (Sumbangan Pembinaan Pembayaran), dan juga sekolah dahulu tidak mendapat suplai dana dari yayasan, terutama sekolah PGRI yang dimana yayasannya ialah Yplp (Yayasan Pembina lembaga pendidikan). Sehingga sekolah itu tidak mendapat bantuan dana, sehingga guru saat itu berjuang sendiri dalam membangun sekolah juga untuk kehidupan guru itu sendiri karena yayasan Yplp (Yayasan Pembina lembaga pendidikan) hanya sebagai melindungi nama sekolah saja dan tidak memberikan dana bantuan”²¹

Dalam keterangan dari narasumber menyebutkan bahwa saat itu kehidupan guru benar-benar penuh perjuangan dalam menegakkan pendidikan. Dari yang diterangkan oleh narasumber bahwa kehidupan dari sekolah seperti hidup sendiri, namun juga tidak semua kehidupan guru tergantung dengan sekolah, karena saat itu juga menurut keterangan

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Tri Soekarno pada tanggal 21 Januari 2022 Di Kediaman Bapak Tri Soekarno

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Soekarno pada tanggal 21 Januari 2022 Di Kediaman Bapak Tri Soekarno

narasumber yang dahulu selaku kepala sekolah SMP PGRI ini banyak meminta bantuan guru yang sudah menjadi PNS. Saat itu juga terdapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dimana mengurus mengenai gaji maupun kenaikan pangkat guru PNS, saat itu juga terdapat pembagian pengurusan baik dari kecamatan maupun kabupaten. Di kabupaten mengurus mengenai gaji guru SMP sederajat, sedangkan di wilayah kecamatan mengurus mengenai gaji guru TK, sedang guru SD diurus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok, karena saat itu gaji guru SD yang diperhatikan. Berbeda dengan guru swasta dimana gaji guru swasta saat itu benar-benar murni dari SPP siswa yang dimana memang tidak mendapat bantuan dari yayasan maupun pemerintah. Adapun besaran gaji di kisaran Rp 3.500 untuk guru honorer untuk guru PNS itu sekitar 13.000-18.000. Untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, banyak dari kalangan guru yang mencari pekerjaan sampingan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru sekolah pada sore hari, ada yang menjadi makelar. Sehingga hal tersebut sedikit membuktikan bahwa kehidupan guru pada saat itu belum bisa dijadikan patokan oleh masyarakat Indonesia.²²

Narasumber mengatakan bahwa walau menjalani pekerjaan sampingan, kehidupan guru saat itu juga belum mencukupi dimana saat itu juga harga bahan pokok yang ikut naik tanpa ada kenaikan pula dalam sistem penggajian guru, sehingga membuat guru terkadang memiliki 2-3 pekerjaan sampingan. Selain itu juga kebutuhan saat itu juga tidak mencukupi sehingga membuat

²² Berdasarkan hasil wawancara Bapak Tri Soekarno pada tanggal 21 Januari 2022 Di Kediaman Bapak Tri Soekarno

banyak sekali guru yang mencari pekerjaan sampingan. Menurut Pak Harto yang menjadi guru pada periode 1982-2015 ini mengatakan:

“ khusus guru sekitar tahun 1989 atau 1990 itu bahwa guru memiliki sistem kredit poin yang dimana berpengaruh di sistem penggajian guru karena dihitung mulai mempersiapkan pembelajaran sekolah²³”³

Dengan tuntutan yang sangat besar pada saat itu yakni mencerdaskan anak-anak bangsa namun tidak ditunjang dengan fasilitas ekonomi yang memadai sehingga membuat guru banyak yang memiliki pekerjaan sampingan.

B. Tunjangan Guru

Ada satu hal yang dapat disebutkan bahwa dalam hal pelayanan Masyarakat supaya memiliki pelayanan yang bagus, pemerintah menyiapkan gaji yang lumayan besar untuk pegawai Negara, selain itu juga memiliki tunjangan yang lumayan banya untuk satu pegawai Negara. Namun beda halnya dengan guru dimana guru saat itu hanya memiliki tunjangan anak, tunjangan istri dan tunjangan beras. Bagi guru tunjangan itu cukup membantu kehidupan ekonomi, namun semakin lama baik gaji maupun tunjangan tersebut tidak mencukupi, hal tersebut imbas dari kenaikan harga pokok yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia dan Indonesia saat itu bergantung dengan hasil minyak. Walaupun juga saat itu Indonesia berhasil menjalankan program swasembada beras pada tahun 1984-1986, tidak menjadikan patokan kualitas beras yang didapat oleh guru dalam keadaan

²³ Hasil wawancara dengan ibu sundari pada tanggal 21 januari 2022

kualitas terbaik. Hal tersebut disampaikan oleh bu sundari selaku narasumber mengatakan:

“ gaji guru saat itu itungannya sedikit mas, guru juga harus mempunyai kerja sampingan mas. Hal itu karena gaji guru juga kurang mencukupi untuk kebutuhan pokok, walau dapet tunjangan beras dari pemerintah tapi beras yang dikasih kualitasnya buruk, bisa dibilang beras yang jelek. Saya pernah ambil di beras bulog itu, pas dibuka berasnya kuning, hancur dan terkadang juga berbau sedikit”.

Berdasar pengakuan tidak sedikit yang mengeluhkan beras tunjangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan kualitas beras tunjangan yang begitu buruk dengan kualifikasi bahwa beras tersebut hancur, berwarna kuning juga terkadang sedikit berbau.

C. Birokrasi

Birokrasi sipil di Indonesia menurut versi pemerintah adalah pegawai negeri dari pejabat eselon I atau jabatan struktural sampai jabatan fungsional yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Rekrutmennya lewat seleksi dan proses pengangkatan. Fungsi pegawai negeri adalah menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan penerapan kebijakan pemerintah. Pendekatan birokrasi inilah yang paling efektif menjalankan roda lembaga pendidikan.

Birokrasi atau aparat administrasi ini merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Organisasi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada zaman Pemerintahan Soeharto berkembang istilah jajaran birokrasi sebagai abdi negara. Abdi negara ini kemudian terhimpun dalam suatu wadah yang diberi nama KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia),

yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1971 sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia. Tujuannya untuk menyatupadukan unsur aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, di lingkungan militer berlangsung juga program kekaryaannya ABRI. Dalam kekaryaannya ini, personil ABRI masuk atau dimasukkan, ditunjuk dan diangkat menjadi pejabat yang memimpin posisi kunci di jajaran pemerintahan sipil. Berlangsung juga kooptasi dan mobilisasi terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Dharma Wanita, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Karang Taruna, PGRI, Organisasi Siswa Intra Sekolah dan lain-lain untuk menjadi anggota Golkar. Proses ini lazim dikenal dengan gejala Golkarisasi. Hal ini berjalan dalam payung kebijakan di awal Orde Baru, yaitu PP No. 6 Tahun 1970 yang mengharuskan sikap mono loyalitas PNS terhadap Golkar. Untuk mempertahankan status quo, pemerintah menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai penopangnya. Untuk itu diterbitkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969 yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik (parpol). Selain itu, pada masa Soeharto terlihat gejala parkinsonisasi birokrasi yaitu proses menjadikan fungsi birokrasi untuk menampung kader-kader politik penguasa atau rezim. Gejala parkinson ini ditandai dengan jumlah jabatan atau posisi dalam departemen dan non-departemen yang semakin diperbesar untuk

menampung atau memberi kompensasi jabatan pada para pendukung politik yang berjasa memenangkan pemilu dan mendukung pemilihan presiden yang berkuasa, tanpa batasan periode waktu. Sehingga jumlah birokrasi membesar dan sekaligus menjadi alat untuk mengawasi dan membatasi hak-hak ekspresi anggota masyarakat. Sentralisasi kekuasaan didukung penuh oleh sistem birokrasi yang berpolitik dan menjadi instrumen hegemonik berupa aparatur ideologi yang mendukung otoritarianisme. Secara politik, birokrasi dijadikan sebagai pembina partai politik. Secara ekonomi, birokrasi digunakan sebagai penopang jalannya pembangunan ekonomi nasional. Sebagai hasilnya, proses demokratisasi terhambat, kesadaran rakyat pada hak politiknya cenderung dibuat rendah dan partai politik tidak diberi ruang optimal untuk berperan sebagaimana partai politik di negara demokrasi.

Pendidikan itu sendiri menjadi objek birokratisasi yang sangat kaku dan sentralistik. Semua produk kebijakan dalam bidang pendidikan senantiasa menjadi produk para birokrat yang sebenarnya hanya sedikit dari mereka yang benar-benar pengalaman secara akademik di dunia pendidikan. Pada masa ini terjadi juga gejala birokrasi mengawasi masyarakat secara birokratis dan berjenjang dengan pengendalian yang ketat. Hal ini terjadi pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, terutama lembaga pendidikan negeri. Untuk yang swasta, karena mereka harus mengikuti standar nasional dan standar itu yang menentukan adalah Depdiknas, maka dengan sendirinya mereka ikut-ikutan menjadi birokratis. Dengan kata lain, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia lebih berorientasi pada birokrasi daripada gerakan intelektual.

Birokratisasi pendidikan seakan telah menjadi mainstream politik pendidikan di Indonesia. Birokratisasi ini telah menyebabkan para ilmuwan dan akademisi, termasuk guru yang kreatif dan inovatif tidak mampu mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

D. PGRI KABUPATEN KEDIRI: Bentuk Korporatisme Orde Baru 1982-1997

Salah satu aspek krusial untuk menjaga kestabilan politik dalam pembangunan adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintahan Orde Baru sangat memahami pentingnya aspek stabilitas politik dalam mendorong proses pembangunan ekonomi. Stabilitas politik juga dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan dalam menarik bantuan modal asing yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi.

Kelompok korporatis yang ada pada masa rezim Orde Baru diantaranya KNPI untuk kelompok pemuda, SPSI untuk buruh, HKTI untuk petani, HNSI untuk nelayan, KADIN untuk pengusaha, HIPMI untuk pengusaha muda, Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk wartawan, KORPRI untuk Pegawai Negeri, PGRI khusus untuk para guru, dan lain sebagainya.

Strategi korporatisme tidak lain untuk mengontrol dan memobilisasi guru. Dengan organisasi profesi tunggal PGRI, guru-guru lebih mudah

dikontrol dan diarahkan untuk mendukung GOLKAR dalam pemilu²⁴. Hal ini dapat dilihat dalam hasil kongres XIII tahun 1973 dan konferensi pusat tahun 1975. Kedua keputusan ini menjadi dasar sikap politik PGRI pada masa Orde Baru. Keputusan kongres ini diperkuat melalui konferensi pusat PGRI ke II tahun 1975, yang menyatakan bahwa pada bidang umum/organisasi, PGRI sebagai organisasi komponen Golkar

E. Awal Reformasi

Memasuki era Reformasi terjadi euforia baru dalam menggemakan kebebasan dan mengupayakan demokrasi setelah kehidupan masyarakat Indonesia terkungkung selama Orde Baru. Terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Termasuk perubahan terhadap nasib guru di Indonesia.

Perhatian pemerintah mulai dapat dirasakan secara bertahap pada masa Reformasi terhadap profesi guru. Puncaknya ialah dengan di terbitkan Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD²⁵) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada 30 Desember 2005. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mengalami kemajuan. Terutama mengenai profesionalisme guru dimana guru diharuskan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi

²⁴ Duverger, Maurice, *partai politik dan kelompok-kelompok penekan* Jakarta: bina aksara. 1984 hlm 20

²⁵ Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dtandatangani Presiden Republik Indinesia tanggal 30 Desember 2005

sosial. Kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara Nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pengembangan kurikulum lokal dan Nasional, peningkatan mutu dan manajemen sekolah, pelatihan dan penilaian kinerja guru

Dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat guru di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini minimal ada tiga *point* penting yang menjadi sorotan. Pertama yaitu mengenai peningkatan kualitas dan profesionalisme guru melalui program sertifikasi. Kedua, perlindungan hukum terhadap profesi guru. Ketiga, adanya peningkatan terhadap kesejahteraan guru.

Peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi diantaranya mengharuskan guru memiliki jenjang pendidikan Strata I (S1). Oleh karenanya guru yang belum memiliki jenjang pendidikan S1 harus kembali menempuh pendidikan agar dapat mengikuti program sertifikasi. Melalui program sertifikasi citra dan martabat guru seperti terangkat. Dari yang tadinya merupakan profesi yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kini profesi guru mulai terangkat baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi menjadikan profesi guru terangkat harkat dan martabatnya.

Kajian mengenai pendidikan guru serta kehidupan sosial ekonomi guru akan selalu menarik untuk dikaji karena permasalahan itu berkajian dengan tingkat profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Dimana kualitas dari pendidik itulah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi idealnya profesionalisme guru akan semakin mengalami peningkatan apabila ditunjang dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang memadai. Namun pada kenyataannya masih ada saja yang belum memiliki kualitas yang memadai sebagai seorang pendidik. Sehingga pendidikan di Indonesia harus terus mengalami perbaikan demi tercapainya sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

F. Era Reformasi

Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Adapun yang menjadi tujuan reformasi adalah tercapainya suatu tatanan kehidupan yang baru dan lebih baik dalam masyarakat madani, yaitu masyarakat demokratis, sejahtera dan agamis.

Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal era reformasi. Reformasi politik tahun 1998 berimbas pada bidang pendidikan. Aspirasi-aspirasi mengenai pentingnya reformasi di bidang pendidikan mulai banyak digaungkan.. Guru terus bergerak, tidak lagi menjadi profesi termarjinalkan

baik secara sosial ekonomi dan politik. Bahkan perubahan bukan hanya pada otonomi guru, tetapi sampai pada tingkat institusinya. Tidak bisa dipungkiri, selama pemerintahan Orde Baru, sistem pendidikan hanya mampu menciptakan guru yang bergerak menurut petunjuk. Guru dikondisikan untuk patuh terhadap larangan yang tidak membenarkan untuk berserikat karena saat itu hanya ada organisasi tunggal untuk guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan mengemukakan pendapat secara demokratis. Pemerintah menggunakan istilah “profesi” sebagai jerat untuk melumpuhkan kekuatan guru sebagai serikat pekerja. Ruang gerak guru dibatasi. Guru kehilangan keberanian. Tegasnya, guru selama Orde Baru dan sampai sekarang adalah kelompok profesi yang tertekan. Kondisi seperti itu diciptakan melalui politik pendidikan yang dikehendaki penguasa. Sistem pendidikan diatur secara sentralisasi dan birokratis. Pengaturan elemen-elemen dalam pendidikan seperti kurikulum, guru, anggaran pendidikan, pengawas pendidikan dan lain sebagainya ditentukan pemerintah. Selain itu, Orde Baru menerapkan kebijakan korporatis yang mengkooptasi masyarakat yang hampir terjadi di seluruh wilayah kehidupan sehari-hari. Semua elemen masyarakat yang bertentangan dengan pemerintah dibungkam agar tidak mengganggu kepentingan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan, yaitu: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Ahli ekonomi sebagai perumus kebijakan, angkatan bersenjata sebagai pengawal stabilitas, dan birokrat sebagai pelaksana.

Pemerintah Orde Baru mematikan semua aktivitas dan organisasi otonom masyarakat sipil yang merupakan ciri demokrasi. Watak korporatis dan kelompok korporatis ini menjadikan kekuasaan rezim Orde Baru sebagai sebuah totalitas, dan lembaga seperti Golkar, adalah unit yang dalam kesatuan utuh sebuah mesin penggilas demokrasi. Selain itu, watak kelompok korporatis ini bercirikan unit konstituennya terbatas, wadah tunggal karena memonopoli kepentingan tertentu, mewajibkan keanggotaan, diatur secara hirarkis dan direstui, bahkan diciptakan sendiri untuk dapat dikendalikan. Singkatnya, cara korporatis ini adalah kontrol yang dipaksakan atau kooptasi untuk mempertahankan kepentingan pemerintah. Kelompok korporatis seolah-olah mewakili suara masyarakat, padahal perpanjangan tangan rezim untuk memaksakan kepentingannya kepada masyarakat. Kondisi seperti itu menyebabkan tertekannya warga negara yang majemuk, tidak leluasa berserikat atau berkumpul secara merdeka, beragam dan independen. Salah satu yang terpenting adalah pengakuan atas hak-hak guru khususnya untuk menumbuhkembangkan organisasi guru yang kritis dan progresif kurang mendapat porsi.

Ruang demokratisasi benar-benar terbuka saat reformasi 1998 bergulir.

Hal ini merupakan kesempatan guru untuk melakukan gerakan yang selama ini vakum. Guru-guru itu mengorganisasikan diri, bergerak memperjuangkan nasib pendidikan yang semakin terpuruk, menentang dan meluruskan pemerintah yang memelihara dan menjaga keterpurukan itu. Penjinakkan dan pengendalian hampir semua pergerakan dan organisasi yang berbasiskan

masyarakat langsung, termasuk organisasi guru ternyata justru menghasilkan kesempatan bagi serikat/organisasi yang independen di Indonesia untuk berkembang. Represitas terhadap guru akhirnya menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan.

Muncul organisasi-organisasi guru independen di berbagai daerah. Di Jakarta, sejak tahun 1999 beberapa guru membentuk Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), di Garut berdiri Forum Guru Garut, Di Banyumas, Forum Guru Banyumas, Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) di Lampung, Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Bandung, dan lainnya. Pada suatu kesempatan dalam pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk guru di Jakarta, organisasi-organisasi guru itu bertemu. Memanfaatkan waktu senggang, dilakukan pertemuan-pertemuan sekelompok guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta untuk berjuang meningkatkan harkat, martabat guru, serta memperbaiki pendidikan nasional. Hasilnya, pada 17 Januari 2002 perwakilan dari organisasi guru di sejumlah daerah berkumpul di Jakarta. Tugu Proklamasi menjadi saksi deklarasi Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). FGII adalah kumpulan dari beberapa organisasi guru independen di beberapa daerah di Indonesia. Jakarta Teachers Club (JTC), Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Forum Guru Garut (FOGGAR) Garut, Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI), Forum Interaksi Guru Banyumas (FIGURMAS), Forum Guru Malang (FGM), Persatuan Guru Mahardika Indonesia (PGMI) Lombok dan Bali, Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) Sumbar, Forum

Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Perhimpunan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) Kediri, Aliansi Guru Nasional Indonesia (AGNI), dan organisasi guru lainnya yang bersifat independen dan terbuka. Selama pemerintahan Orde Baru, kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung didominasi oleh keputusan dari atas ke bawah (top down). Kecenderungan kepada pendekatan manajemen yang sentralistik menurut beberapa ahli berakar pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang menghambat pengembangan kewiraswastaan serta sumber pengembangan kelembagaan serta pengelolaan. Pendekatan sentralistik ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan nasionalisme, justru pada kelompok umur yang secara umum sangat peka terhadap pembentukan kepribadian. Dalam jenjang pendidikan inilah dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi ketahanan nasional dan kepribadian nasional, apresiasi budaya nasional dan daerah, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air sebagai negara kesatuan. Mempunyai organisasi yang kuat tetapi kaku. Kondisi seperti ini dapat dipahami bahwa keadaan di awal-awal kemerdekaan, pendidikan merupakan sarana pengobaran semangat nasionalisme.

Manajemen sentralisasi tidak dapat dipisahkan dari ideologi-ideologi yang mendasarinya. Politik dan sistem pendidikan yang diciptakan merupakan alat bagi reproduksi sosial untuk melestarikan sistem sosial ekonomi dan politik yang mendukungnya. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa kesepakatan politik telah memberikan kepada rezim yang berkuasa untuk lebih jauh mengontrol lembaga dan materi pendidikan yang ada dalam masyarakat.

Tujuan politik yang hendak dicapai dari konsep pendidikan dan pelaksanaan konsep sentralistik itu adalah bahwa sistem pendidikan dapat menjadi alat seleksi, kontrol dan sosialisasi nilai, pengetahuan dan keterampilan yang efektif dan masif agar tercapai legitimasi kekuasaan dan mobilisasi tenaga kerja. Dalam proses ini, pemerintah melalui konsep pendidikan yang integralistik menyeleksi, mengembangkan dan mengontrol nilai-nilai moral/kebudayaan dan kompetensi praktis sehingga menyatukan heterogenitas subsistem sosial-budaya (pendidikan) agar dapat dimobilisasi. Akibatnya, sistem pendidikan yang tunggal berdiri di atas subkultur pendidikan bangsa yang plural.

G. Reaksi Guru di Kabupaten Kediri Terhadap Organisasi PGRI

Mobilisasi guru lewat PGRI ini menjadi pemicu ketidakpuasan para guru. Selain itu, kehadiran PGRI kurang dirasakan manfaatnya. Saat ruang demokratisasi terbuka lebar, guru-guru menggunakan momentum ini untuk bergerak dan membentuk organisasi guru baru yang selama Orde Baru hanya ada PGRI. Kemunculan organisasi-organisasi guru di luar PGRI di era reformasi memiliki latar belakang tertentu. Sebagai wadah aspirasi guru, peranan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dinilai kurang memberi manfaat. Bahkan PGRI dimobilisasi untuk kepentingan politik. Guru-guru di Indonesia cenderung kecewa dengan kinerja di PGRI yang kurang dirasakan manfaatnya.

Kehadiran organisasi guru dapat dipahami secara makro dan mikro. Secara makro, organisasi guru lahir berawal dari kekecewaan terhadap rezim

yang mengatur dan mengontrol segalanya. Sehingga muncullah beberapa elemen masyarakat yang merasa kepentingan untuk melawan hegemoni negara, yaitu dalam bentuk-bentuk asosiasi sukarela atau volunteer association. Alat-alat kekuasaan negara yang hegemonik pada masa Orde Baru, misalnya PGRI.

Secara mikro, kehadiran organisasi-organisasi guru itu dapat dipahami sebagai pressure group, kelompok penekan. Sehingga yang tadinya ditekan negara, sebaliknya sekarang menjadi pengawas pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Kelompok guru mendirikan organisasi lain karena memandang PGRI tidak mampu menjawab permasalahan mereka. Ia mencontohkan kurangnya perlindungan terhadap guru-guru yang mendapatkan masalah. Organisasi guru memiliki dua fungsi. Yang pertama, menjaga, melindungi dan menyejahterakan anggotanya, serta meningkatkan kualitasnya. Yang kedua adalah sebagai kekuatan politik. Pandangan tentang ketidakpuasan terhadap PGRI dikuatkan oleh data survei yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun 2000²⁶. Munculnya organisasi guru di luar PGRI belakangan ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana efektivitas organisasi PGRI dalam memperjuangkan aspirasi guru anggotanya. Data survei ini membuktikan PGRI kurang bisa memperjuangkan kepentingan guru. Selama ini, PGRI lebih merupakan representasi dari birokrasi pemerintah dan bersifat elitis, sehingga mereka gagal memahami kepentingan guru. Bahkan PGRI hanya menjadi beban guru

²⁶ Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun 2000

sebab tega menyusutkan kesejahteraan anggotanya melalui pemaksaan iuran organisasi tanpa pernah memperjuangkan nasib guru yang terus menerus ditindas. Iuran diambil langsung oleh PGRI ketika guru sedang menerima gaji. Dan anehnya pungutan itu tidak tercatat di slip gaji sehingga sulit dibuktikan

PGRI tidak ubahnya seperti organisasi yang elitis dan tidak memperhatikan kepentingan guru. Sifat elitis tersebut disebabkan sebagian besar personil di kepengurusan adalah orang-orang birokrasi yang tidak memahami persoalan guru dan pendidikan. Sepak terjang PGRI hanya menguntungkan kelompok tertentu, bahkan dalam prakteknya justru merugikan kepentingan guru, misalnya melalui pungutan yang diambil paksa dari gaji guru. Bila dulu PGRI besar, itu karena jumlah anggotanya diambil secara otomatis. Artinya setiap guru secara otomatis masuk sebagai anggota PGRI. Ketidakmampuan PGRI dalam menjalankan peranannya memang menjadi alasan sebagian guru untuk mendirikan organisasi guru lain. Baik itu dalam memperjuangkan kesejahteraan guru atau mengubah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Reformasi ekonomi dirumuskan dengan mengembangkan kehidupan ekonomi yang terbuka dan bersifat adil, termasuk dalam penyediaan anggaran untuk pendidikan. Dalam reformasi hukum dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap instrumen hukum yang membuat seluruh lapisan masyarakat menghormati dan menaati segenap hukum yang berlaku. Sehingga tercipta masyarakat yang demokratis. Cita-cita reformasi adalah membangun masyarakat demokratis. Dalam proses pendidikan, negara demokratis mengakui hak-hak serta

kewajiban perorangan/kelompok di dalam masyarakat. Masyarakat demokratis bisa terwujud apabila hak-hak dan kewajiban warga negaranya diakui, dikembangkan dan dihormati. Selain itu, pendidikan demokratis menjadi tuntutan reformasi. Ada unsur-unsur yang harus diwujudkan, antara lain: Manusia memerlukan kebebasan politik, artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah mempunyai rasa keadilan dan toleransi. Sebab kalau tidak demikian, maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan menggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik harus mengetahui mengenai hak-hak politiknya, antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan dari sentralisasi menuju arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada masyarakat. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah atau memberdayakan masyarakat, sehingga leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarasa sendiri. Sebelumnya, sistem pendidikan yang sentralistik di bawah satu komando Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya, sentralisasi kurikulum, sentralisasi pengawasan, sentralisasi pengawasan mutu dalam lembaga Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Rumusan misi pendidikan nasional dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, yang secara jelas disebutkan

bahwa menciptakan suatu sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu perlu untuk dilakukan; dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Rumusan misi pendidikan nasional tersebut membuat jelas bahwa sistem dan iklim yang ada tidak cocok lagi dengan misi Orde Baru, yang sentralistik dan birokratis serta mematikan jiwa demokrasi. Sistem yang kaku serta mematikan partisipasi masyarakat, inisiatif dan kreativitas peserta didik, dan pendidik tidak mungkin melahirkan iklim atau proses pendidikan yang demokratis. Begitu pula halnya, dengan suatu sistem yang kaku, maka akan sulit membangun suatu pendidikan yang akan menghasilkan output bermutu. Karena pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya, dengan sendirinya kualitas manusia Indonesia yang hidup di dalam lingkungan daerahnya menjadi terasing dan tidak menunjang perbaikan taraf hidup di daerahnya sendiri. Warisan pendidikan Orde Baru telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia seolah robot yang tidak berkualitas dan tentunya tidak berdaya saing. Selanjutnya secara lebih khusus, visi dan misi pendidikan nasional diturunkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang dijadikan acuan pendidikan nasional selama lima tahun sekali.

Periode reformasi memberikan nuansa baru dalam tatanan struktur organisasi keguruan, iklim demokrasi yang semakin terbuka memberikan kebebasan bagi setiap guru untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Setiap guru bebas menyatakan kehendaknya untuk mengikuti organisasi yang dipandang lebih memperjuangkan nasibnya. Pengembangan demokratisasi

tersebut membuka peluang tumbuhnya organisasi-organisasi guru independen yang ada di setiap daerah. Selain itu muncul ketidakpuasan guru terhadap organisasi guru yang telah ada, organisasi tersebut dianggap kurang mewakili aspirasi mereka sehingga mereka berani untuk keluar dan membentuk organisasi baru.

Depdiknas (Departemen pendidikan nasional) pada tahun 2000 melakukan survei bertema Perlindungan Hukum Tenaga kependidikan dalam rangka menyusun undang-undang perlindungan guru. Survei dilakukan di 14 (empat belas) Provinsi dengan sampel 250 responden (guru) secara acak dari SD, SLTP, SMU, dan SMK dengan hasil yang cukup mencengangkan tentang efektivitas organisasi PGRI dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya. Sebanyak 59,2% guru menjawab PGRI belum ada manfaatnya, 27,2% ada manfaatnya, 9,2% tidak bermanfaat sama sekali, 4,4% tidak menjawab. Selanjutnya 31,6% guru menjawab PGRI tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan guru, 14,4% tidak mampu menampung aspirasi guru, dan 16% tidak mampu memberi perlindungan hukum.²⁷

Hasil survey yang dilakukan oleh Depdiknas memberikan gambaran fakta yang cukup signifikan, ternyata guru memiliki ketidakpuasan terhadap organisasi profesi yang telah menaunginya. Mereka merasakan belum ada manfaat dari keberadaan PGRI baik dalam memperjuangkan kesejahteraan guru maupun perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi. Survey ini menjadi salah satu fakta yang menunjukkan faktor-faktor penyebab

²⁷*Media Indonesia, Jum'at 14 April 2000: 9*

munculnya organisasi guru diluar PGRI. Guru menunjukkan ketidakpuasannya dengan membentuk organisasi baru yang dianggap lebih memperjuangkan aspirasi, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan profesi mereka. Asas kebebasan yang muncul pada era reformasi dan ketidakpuasan guru terhadap PGRI inilah yang kemudian mendorong munculnya organisasi-organisasi guru diluar PGRI, sebut saja Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Namun itu semua tidak menyurutkan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru Indonesia. Profesi guru, baik berstatus swasta (honorar, guru tidak tetap, suka relawan), maupun pegawai negeri sipil dalam sepuluh tahun terakhir seolah menjadi benchmark , sekaligus pangsa lapangan pekerjaan yang sangat diminati, sehingga bursa kerja di bidang ini selalu penuh. Hal itu, tentunya sangat jauh berbeda dengan dua puluh tahun yang silam, di mana perhatian pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan para guru kurang diperhatikan. Praktis, waktu itu status guru menjadi status yang termarginalkan dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Namun, sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen cerita itu berbanding terbalik dengan fakta empirik belakangan ini, di mana profesi guru seolah menjadi primadona, sekaligus profesi yang sangat fenomenal saat ini. Poin penting yang harus dipahami, bahwa setiap tahun jumlah lulusan perguruan tinggi keguruan sangat

melimpah sehingga peluang kerja di bidang itu juga sangat kecil dan kompetitif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada era pemerintahannya menegaskan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang kedudukannya sejajar dengan profesi lain, misalnya profesi pengacara, notaris, dokter atau akuntan. Karena Guru adalah profesi, maka perlu adanya proses pembuktian profesionalitas yang bersangkutan. Di masa sekarang tentu sudah kita dengar adanya sertifikasi Guru. Ini merupakan suatu wadah untuk pembuktian profesionalitas Guru. Melalui Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, nasib Guru hendak diangkat tinggi-tinggi. Profesionalitas Guru bakal diakui pemerintah melalui program sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi adalah pengakuan formal dari pemerintah terhadap sosok Guru sebagai tenaga profesional, mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah atas. Dengan pengakuan itu, berarti profesi Guru disejajarkan dengan profesi bergengsi lainnya sebagai tenaga profesional. Janji pemerintah pun bergulir, bagi Guru yang mendapatkan sertifikasi, bakal memperoleh banyak keuntungan. Diantaranya yakni berhak mendapatkan kenaikan penghasilan sebesar satu kali gaji pokok. Guru yang dinyatakan lulus sertifikasi, maka yang bersangkutan akan memperoleh tunjangan tambahan yang besarnya sama dengan besar gaji pokok. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di kemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal

sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi Guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi Guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Dalam UU 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut UU 14 Tahun 2005, pasal 8 adalah Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional²⁸.

Kualifikasi akademik dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga kualifikasi Guru dapat dilihat pada PP 19 Tahun 2005, pasal 29 (ayat 16) profesi Guru untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1).²⁹ Dalam UU 14 Tahun 2005 pasal 10 (ayat 1) bahwa Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

²⁸UU 14 Tahun 2005, pasal 8

²⁹pada PP 19 Tahun 2005, pasal 29 :ayat 16

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi³⁰. Sasaran terakhir menciptakan Guru yang professional, yaitu: guru yang benar-benar mampu menekuni profesi diembannya secara baik untuk menciptakan sistem. Pendidikan yang lebih baik. Dalam lintasan sejarah, profesi guru adalah profesi yang sangat mulia. Dalam perjalanan pendidikan Islam, Rasul saw merupakan *Mu'allimul Awwal fil Islam* (pendidik pertama dalam Islam), yang telah mengajarkan ayat-ayat Allah swt kepada manusia, menyucikan jiwa dari dosa, menjelaskan yang baik dan buruk, yang halal dan haram, menceritakan masa silam dan memprediksikan masa depan. Selanjutnya, setelah Rasulullah saw tiada, para sahabat terdekat rasul, *tabi'in* dan ulama pada masa selanjutnya melanjutkan perjuangannya untuk menjadi guru.

Kemuliaan guru juga dirasakan pada masyarakat Indonesia. Walaupun penghargaan terhadap guru belum terlihat pada pemerintahan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang maupun diawal kemerdekaan. Lahirnya Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membawa angin segar bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru Indonesia. Janji pemerintah pun bergulir, bagi Guru yang mendapatkan sertifikasi, bakal memperoleh banyak keuntungan. Diantaranya yakni berhak mendapatkan kenaikan penghasilan sebesar satu kali gaji pokok. Guru yang dinyatakan lulus sertifikasi, maka yang bersangkutan akan memperoleh tunjangan tambahan yang besarnya sama dengan besar gaji pokok.

³⁰UU 14 Tahun 2005 pasal 10 :ayat 1

BAB IV

HASIL ANALISIS KEHIDUPAN GURU

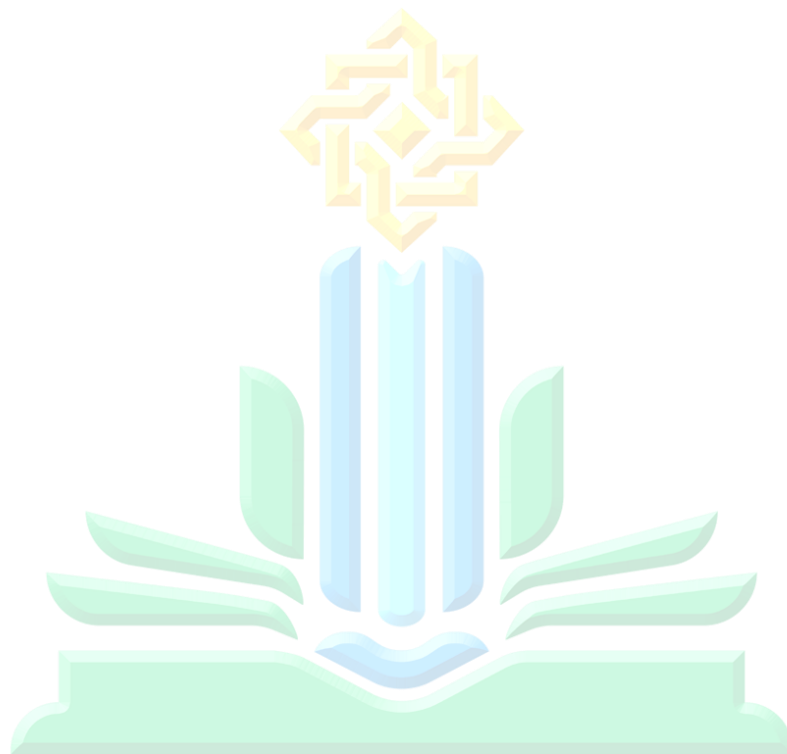
Analisis temuan yang menyangkut kehidupan guru di kabupaten Kediri pada tahun 1980-2000, temuan dari peneliti ialah bahwa dimulai dari kegiatan ekonomi Negara Indonesia yang luar biasa pada periode sekitar tahun 1970 sampai 1980 ternyata tidak diimbangi dengan kualitas kehidupan keguruan pada masa tersebut. Pada masa Orde Baru memang berhasil menyerap tenaga pendidik profesi keguruan namun tidak diimbangi dengan kehidupan ekonominya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya guru yang memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi guru. Juga banyak sekali guru yang kehidupannya benar-benar memprihatinkan. Kenaikan harga bahan pokok juga menambah keprihatinan terhadap guru pada masa tersebut. Diungkapkan dari salah seorang narasumber menyebutkan bahwa guru saat itu dipandang sebagai profesi yang tidak menjamin kehidupan, bahkan profesi guru bisa disebut kurang mendapat pengakuan dari masyarakat karena memang profesi ini kurang menjanjikan. Dibanding dengan profesi yang lain sebagaimana profesi dokter atau profesi yang lain, profesi guru ini dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat dan juga dianggap hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Pada periode 1980-1998 profesi guru ini hanya dipakai sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Hal ini tentunya cukup mengejutkan, karena profesi yang seharusnya diperuntukkan hanya untuk pendidikan bangsa Indonesia, malah dimobilisasi oleh salah satu partai politik untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, dibentuklah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia oleh

pemerintah yang diharapkan oleh kalangan guru untuk dirasakan manfaatnya, untuk digunakan sebagai alat perjuangan dalam menegakkan kesejahteraan para guru, namun pada prakteknya dilapangan sangat bertolak belakang dengan harapan para guru, karena organisasi PGRI ini malah ditunggangi dengan kepentingan politik penguasa Orde Baru yang dimana setiap guru yang masuk organisasi tersebut tdiwajibkan untuk memilih salah satu partai yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut untuk dipilih dalam kegiatan pemilu. Namun setelah kepentingan politik tersebut dilaksanakan pada akhirnya kesejahteraan para guru ini tidak juga berubah. Bahkan Negara yang pernah berhasil dalam kegiatan swasembada pangan ini juga memberikan tunjangan kehidupan yang bisa dikatakan kurang layak. Beras yang diterima guru pada saat itu benar-benar tidak layak konsumsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber bahwa beras yang diberikan sangat tidak layak untuk konsumsi, beras yang kualitasnya buruk bahkan dipakai untuk pakan ternak oleh sebagian besar guru. Dengan itu maka bisa dikatakan cukup memprihatinkan kehidupan guru pada saat itu. Untuk guru yang berstatus Pegawai negeri sipil memang memiliki kesejahteraan yang bisa dibilang lumayan dibanding guru sukwan(honorer), namun secara keseluruhan kesejahteraan guru PNS maupun sukwan bisa dibilang sama. Apalagi ditambah dengan KKN ditubuh Pemerintah Orde Baru yang semakin lengkap membuat kehidupan guru semakin memprihatinkan. Sampai pada akhirnya terjadi tragedi 1998 yang dimana saat itu sudah banyak sekali masyarakat yang bosan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter sehingga menuntut mundurnya kepala Negara saat itu yakni Presiden Soeharto karena dianggap gagal dalam

mensejahterakan rakyat Indonesia tidak terkecuali guru. Setelah peristiwa 1998 yang diwarnai dengan banyak aksi, presiden selanjutnya benar-benar mencoba memulihkan keadaan ekonomi Negara yang carut-marut, sehingga benar-benar terjadi perubahan secara besar-besaran. Kebijakan yang sangat merugikan masyarakat pada masa presiden B.J.Habibie diubah agar kebijakan selaras dengan rakyat, termasuk dalam dunia kependidikan termasuk kesejahteraan keguruan didalamnya, sampai pada akhirnya pada tahun 2005, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono profesi guru benar-benar diakui oleh Negara dan Negara menjamin kehidupan serta kesejahteraan para guru. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, sehingga pemerintah benar-benar memberikan perhatian khusus kepada profesi keguruan. Profesi ini juga oleh Negara dianggap setara dengan profesi yang lain tanpa ada yang namanya pembedaan profesi. Hal ini cukup menggembirakan karena profesi guru diakui secara nasional dan juga tidak ditunggangi dengan kepentingan politik sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Adapun perubahan lain yang terjadi pada masa reformasi, yakni munculnya organisasi guru yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan guru seperti halnya dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).

Banyak guru yang keluar dari organisasi bentukan Pemerintah Orde Baru yakni PGRI yang mana organisasi ini dianggap tidak layak untuk diteruskan karena

tidak benar-benar memperjuangkan kesejahteraan guru pada masa Orde Baru dan dianggap organisasi boneka untuk kepentingan politik saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejarah kehidupan guru pada tahun 1980-2000 benar-benar mengalami lika-liku kehidupan yang panjang dimulai dengan profesi guru yang dipandang sebelah mata, lalu kesenjangan sosial dengan profesi lain yang sangat mencolok, kesejahteraan guru yang benar-benar memprihatinkan pada masa Orde Baru, berubah setelah terjadinya peristiwa Reformasi 1998 yang mengubah kehidupan guru menjadi lebih baik. Dimana setelah peristiwa 1998, profesi guru ini lebih diperhatikan oleh pemerintah, baik secara sosial maupun kesejahteraan ekonomi benar-benar diperhatikan. Puncaknya dengan dibentuknya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005 serta pengakuan pemerintah terhadap profesi guru serta profesi ini oleh pemerintah disebut sebagai profesi yang setara dengan profesi yang lain sehingga membuat kegembiraan tersendiri bagi kalangan pendidik Negara Indonesia, karena profesi ini diakui secara nasional dan juga diperhatikan baik secara sosial maupun ekonomi.
2. Hasil analisis membuktikan bahwa pada masa Orde Baru, profesi guru hanya dijadikan alat politik pemerintah saat itu untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya PGRI yang dimana hanya dijadikan alat politik untuk memobilisasi para guru agar memilih hak politik yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat itu. Hal itu jelas menyalahi hak guru yang seharusnya guru harus steril dari yang namanya

kegiatan politik, sebagaimana cita-cita para pendiri Negara Indonesia bahwa para guru ini hanya difokuskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sangat menyalahi apa yang sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

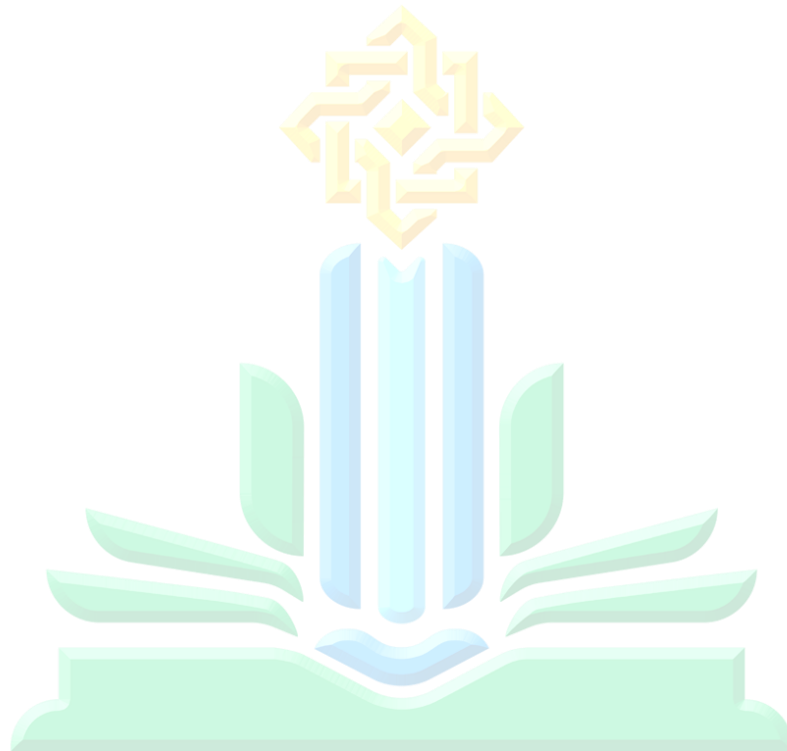
Dan juga hasil analisis membuktikan bahwa organisasi PGRI ialah organisasi yang sangat merugikan guru, dikarenakan organisasi ini ditunggangi dengan kegiatan politik juga mengesampingkan kesejahteraan guru pada saat itu, bahkan guru sampai memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kehidupan mereka.

3. Korupsi yang berada ditubuh pemerintah benar-benar membuat kehidupan ekonomi warga Negara Indonesia benar-benar terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi dan juga membuat kehidupan masyarakat saat itu sengsara.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneruskan penelitian ini namun dengan sisi yang berbeda, dan juga dikhususkan untuk peneliti selanjutnya yang akan memasuki dunia pendidikan benar-benar memberikan perhatian untuk meneliti profesi keguruan lebih mendalam.
2. Untuk pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan kehidupan guru di Indonesia, bukan hanya guru yang berstatus PNS namun juga memperhatikan kehidupan guru sukwan(honorer). Hal ini dikarenakan masih banyak sekali saat ini kehidupan guru yang jauh dari kata layak.

Masih banyak sekali guru yang kesulitan untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Semoga kedepannya pemerintah Membentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memuat kesejahteraan guru terutama guru sukwan(honorer).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*(Jawa Barat: CV Jejak, 2018)

Bartlett. 1986. *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*. Yayasan Idayu: Jakarta

JURNAL

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1993

Kunandar, *guru professional implementasi tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru*, Jakarta:rajawali press 2007

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)

Maretha Riana Ramdhani”*Ekuitas:Jurnal Ekonomi dan Keuangan-* volume 2 nomor 1, maret 2018:106-129

Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung Pustaka Setia, 2014)

INTERNET

Fitri Dewanty, ”Sejarah Kelas 10: Historiografi Dan Metode Peneliitian Sejarah” , [https://pahamify.com/blog/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/\(20 November 2021\)](https://pahamify.com/blog/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/(20-November-2021).).

Harian Kompas Tgl 13 Januari 2001”*Mozaik Perjalanan Ibnu Sutowo*”:Elza Astari Retaduari

<https://validnews.id/ekonomi/Terjebak-Booming-Minyak-Gvw>

Media Indonesia, Jum‘at 14 April 2000: 9

UNDANG-UNDANG

pada PP 19 Tahun 2005, pasal 29 :ayat 16

UU 14 Tahun 2005 pasal 10 :ayat 1

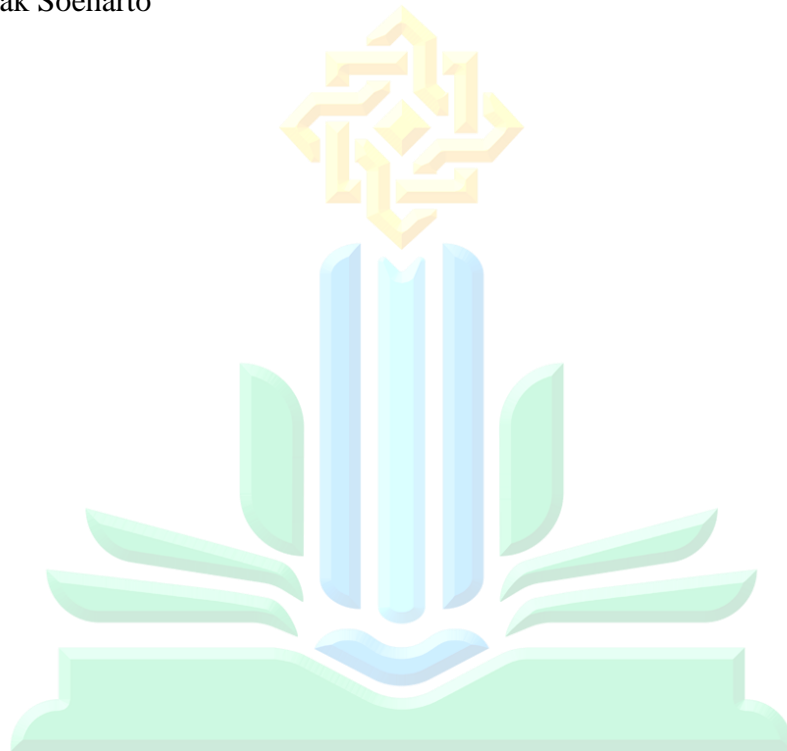
UU 14 Tahun 2005, pasal 8

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Tri Soekarno pada tanggal 21 Januari 2022 Di Kediaman Bapak Tri Soekarno

Hasil wawancara dengan Bapak Tri Soekarno pada tanggal 21 Januari 2022 Di Kediaman Bapak Tri Soekarno

Hasil wawancara dengan ibu sundari pada tanggal 21 januari 2022 Di Kediaman Bapak Soeharto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

NAMA : Agus Tri Laksono
NIM : U20184026
PROGRAM STUDI : Sejarah Peradaban Islam
FAKULTAS : Ushuluddin
INSTITUSI : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **“Sejarah Kehidupan Sosial-Ekonomi Guru Di Kabupaten Kediri Tahun 1980-2000”** dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inti dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER

Jember 10 Januari 2023
Saya yang menyatakan



Agus Tri Laksono
U20184026

Lampiran – Lampiran

Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Tanggal/Wawancara : 21 Januari 2022
Tempat/Waktu : Desa Brenggolo kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri

Identitas Narasumber

Nama : Tri Soekarno
Alamat : Brenggolo, Kabupaten Kediri
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah SMP PGRI
Plosoklaten
Umur : 77 Tahun

1. bagaimana kehidupan guru pada tahun 1970-1980 an mbah kung?

Jawab :

Kehidupan guru pada saat itu benar-benar penuh perjuangan. Banyak sekali guru yang istilahnya *nyambi* (memiliki pekerjaan sampingan) di tahun tersebut.

2. Mengapa kok banyak guru yang *nyambi* mbah kung? Apakah kehidupan guru ditahun tersebut bisa dikatakan kurang? Bukankah pemerintah yang memiliki program pemberdayaan guru ?

Jawab :

penghasilan guru sesuai dengan dana yang masuk dari siswa (Sumbangan Pembinaan Pembayaran), dan juga sekolah dahulu tidak mendapat suplai dana dari yayasan, terutama sekolah PGRI yang dimana yayasannya ialah Yplp

(Yayasan Pembina lembaga pendidikan). Sehingga sekolah itu tidak mendapat bantuan dana, sehingga guru saat itu berjuang sendiri dalam membangun sekolah juga untuk kehidupan guru itu sendiri karena yayasan Yplp (Yayasan Pembina lembaga pendidikan) hanya sebagai melindungi nama sekolah saja dan tidak memberikan dana bantuan

3. Lalu bagaimana peran PGRI untuk kesejahteraan guru pada waktu tersebut mbah kung ?

Jawab :

PGRI bisa dikatakan itu sebagai alat politik saja le, jadi di tahun tersebut guru itu wajib masuk PGRI, disitu juga guru harus milih GOLKAR saat ada pemilu, dan disitu juga ada semacam penyunatan dana. Dulu pernah saat itu proses pembangunan sekolah PGRI, nah disitu kan saya bingung dana darimana untuk pembangunan gedung, nah disitu akhirnya saya mengirim proposal ke PGRI kabupaten. Pada waktu itu berhasil lolos verifikasi dan dapet dana 5 juta, waktu itu dana 5 juta itu bisa dikatakan banyak, nah sama pegawai PGRI disunat 500 ribu disuruh mengatur bagaimana yang 500 ribu itu masuk ke LPJ Pembangunan, nah saat itu saya bingung kenapa kok disunat, alasannya sebagai administrasi, tetapi harus dimasukkan ke lembar LPJ yang nantiya dikasi ke kabupaten. Akhirnya karena saya rasa termasuk bagian korupsi, uagya saya kembalikan semuanya ke PGRI kabupaten. Dan setelah itu dana nya diperebutkan untuk membangun beberapa sekolah, salah satunya di SMP PGRI Kandat

4. lalu untuk penyediaan tenaga pendidik di sekolah jenengan itu bagaimana mbah kug??

Jawab :

Jadi untuk penyediaan tenaga pendidik atau guru itu hampir keseluruhan itu nyabang(dobel), jadi kalo dipagi hari itu jadi guru di sekolah lain, siang sampai sorenya baru ke smp PGRI. Karena dulu sekolahnya belum punya gedung sendiri jadi membagi sama gedung sdn brenggolo 1, juga gurunya istilahnya menjadi

pendidik sampingan di smp PGRI.

Narasumber 2

Tanggal/Wawancara : 21 Januari 2022

Tempat/Waktu : Desa Brenggolo kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri

Identitas Narasumber

Nama : Soeharto

Alamat : Brenggolo, Kabupaten Kediri

Pekerjaan : Pensiunan Guru SMP Negeri 2 Wates

Umur : 71 Tahun

1. bagaimana kehidupan guru pada tahun 1970-1980 an Pak Harto?

Jawab :

Jadi guru pada tahun tersebut masih banyak yang nyambi mas. Disitu ada yang jadi petani seperti saya kalo sepulang dari sekolah, ada juga yang jadi makelar, ada juga yang menjadi guru seperti mbah kung yang jadi kepala sekolah smp PGRI plosoklaten..

2. Mengapa kok banyak guru yang nyambi Pak Harto? Apakah kehidupan guru ditahun tersebut bisa dikatakan kurang?

Jawab :

Jadi dulu karena saya ikut CPNS pada waktu tersebut, jadi gaji yang diperoleh saat itu dikisaran 15.000-19.000 mas, tapi kalo sudah jadi PNS itu bisa naik jadi 21.000. tapi karena kebutuhan pokok juga naik jadi banyak orang yang profesinya guru walau PNS itu tetap mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

khusus guru sekitar tahun 1989 atau 1990 itu bahwa guru memiliki sistem kredit poin yang dimana berpengaruh di sistem penggajian guru karena dihitung mulai mempersiapkan pembelajaran sekolah

3. Lalu bagaimana peran PGRI untuk kesejahteraan guru pada waktu tersebut ?

Jawab :

Kalau bicara mengenai PGRI, saat itu ada kebijakan dari pak Harto(Presiden Soeharto) bahwa guru wajib untuk masuk ke PGRI, PGRI bisa dikatakan jadi wadah buat para guru-guru untuk menyalurkan aspirasi seperti berupa kesejahteraan, tetapi banyak agenda yang dijalanka itu berupa politik seperti guru wajib milih salah satu partai yang sudah ditentukan.

Narasumber 3

Tanggal/Wawancara : 21 Januari 2022

Tempat/Waktu : Desa Brenggolo kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri

Identitas Narasumber

Nama : Bu Sundari (Istri Pak Soeharto)

Alamat : Brenggolo, Kabupaten Kediri

Pekerjaan : Pensiunan Guru SMP Negeri 1 Plosoklaten

Umur : Tahun

1. bagaimana kehidupan guru pada tahun 1970-1980 an bu sun?

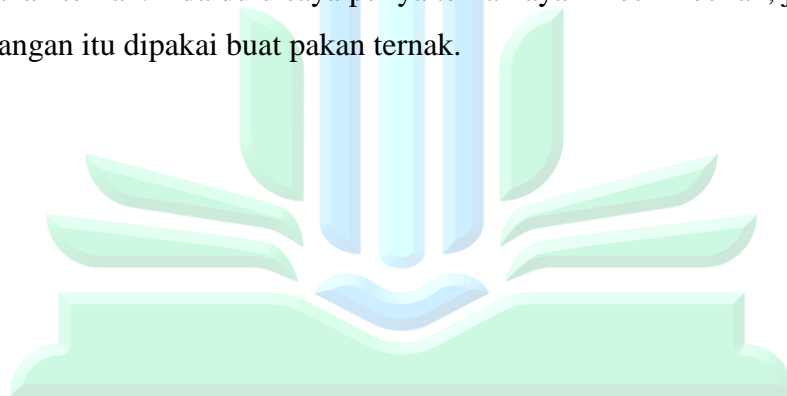
Jawab :

Seperti yang sudah dijelaskan bapak mas, kalo guru hampir semua nasibnya sama pada tahun itu, banyak yang nyambi, bahkan banyak juga yang dobel-dobel jadi gurunya, kayak pagi disekolah ini, siang atau sorenya disekolah lain.

2. Mengapa kok banyak guru yang nyambi? Apakah kehidupan guru ditahun tersebut bisa dikatakan kurang? Bukankah pemerintah yang memiliki program pemberdayaan guru ?

Jawab :

penghasilan guru saat itu tidaklah cukup mas, karena gaji guru pns itu sekitar 20.000 ditahun tersebut tetapi harga bahan pokok itu naik,. gaji guru saat itu itungannya sedikit mas, guru juga harus mempunyai kerja sampingan mas. Hal itu karena gaji guru juga kurang mencukupi untuk kebutuhan pokok, walau dapet tunjangan beras dari pemerintah tapi beras yang dikasih kualitasnya buruk, bisa dibilang beras yang jelek. Saya pernah ambil di beras bulog itu, pas dibuka berasnya kuning, hancur dan terkadang juga berbau sedikit. Terkadang dipakai sebagai pakan ternak. Ada dulu saya punya ternak ayam kecil-kecilan, jadi kadang beras tunjangan itu dipakai buat pakan ternak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Catatan Dokumentasi



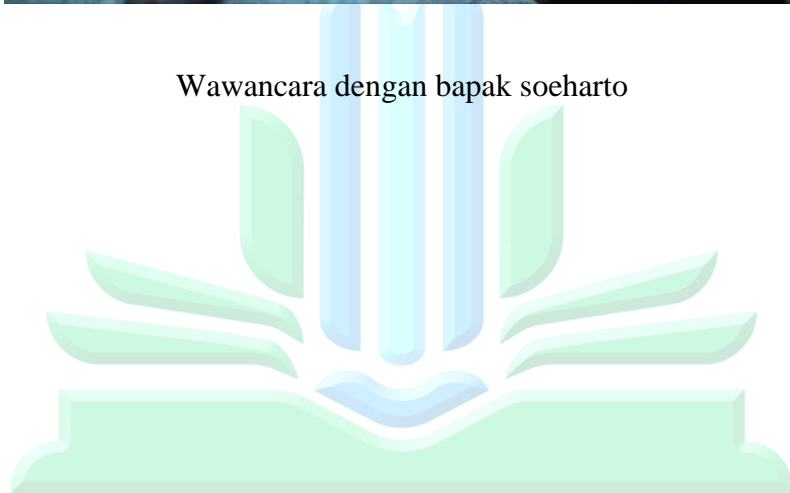
Wawancara dengan bapak Tri Soekarno



Wawancara dengan bapak tri soekarno



Wawancara dengan bapak soeharto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENULIS



IDENTITAS DIRI

NAMA : Agus Tri Laksono

TEMPAT ,TANGGAL, LAHIR : Kediri 16 agustus 1999

JENIS KELAMIN : Laki-Laki

ALAMAT : Dusun Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri

FAKULTAS : Ushuluddin

PROGRAM STUDI : Sejarah Peradaban Islam

NIM : U20184026

RIWAYAT PENDIDIKAN

Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Brenggolo

Madrasah Tsanawiyah negeri Puncu

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Bidang Hukum Paskibra MAN 1 Kota Kediri

Anggota Pramuka MAN 1 Kota Kediri

Ketua Devisi Basket UKOR UIN KHAS Jember